

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (CASE
STUDY: KEPEMIMPINAN SBY DAN JKW)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh

Nama : Rizky Ananda
NPM : 1405180059
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : RIZKY ANANDA
NPM : 1405180059
Prodi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(CASE STUDY : KEPEMIMPINAN SBY DAN JKW)

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Penguji II

SRI ENDANG RAHAYU, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Panitia Ujian

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RIZKY ANANDA
N.P.M : 1405180059
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(STUDY CASE: KEPEMIMPINAN SBY DAN JKW)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Kupersembahkan untuk:
Ibunda, (alm) ayahanda, abang, dan
kakak-kakak serta orang-orang yang
kucintai

*"Allah akan meninggikan orang-orang beriman
di antara kamu dan orang-orang yang diberi
ilmu"*

(Q.S. 58:11)

*"Karena sesungguhnya setelah
kesulitan itu ada kemudahan"*

(Q.S. 94:5)

"Manjadda wa jadda"

*"Siapa yang bersungguh-sungguh pasti
akan mendapatkan hasil"*

"Always do your best and let God do the rest"

ABSTRAK

RIZKY ANANDA. NPM 1405180059. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (CASE STUDY: KEPEMIMPINAN SBY DAN JKW).

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat judul “**Implementasi Kebijakan Transfer Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan Nasional (Case Study: Kepemimpinan SBY dan JKW)**”. Topik ini diangkat berdasarkan fenomena yang terjadi dalam laporan tahunan perekonomian Indonesia bahwasanya pembangunan nasional belum sampai kepada daerah-daerah tertinggal di Indonesia sehingga masih banyak ketimpangan yang terjadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Serta seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk melakukan estimasi dan membuktikan bagaimana variabel-variabel DID, DAU, DAK, dan DD serta IPM_{t-1} dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Serta bagaimana Indeks Pembangunan Manusia tersebut dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data panel, dimana data yang dihimpun adalah data *cross section* adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia sedangkan data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini ialah dihimpun sebanyak 12 tahun, yaitu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2016. Berdasarkan hasil estimasi dengan metode regresi berganda menggunakan *software* E-Views 8, diukur *goodness of fit* (R^2) pada model pertama diperoleh nilai sebesar 2,61%. Variabel independen yaitu DID, DAU, DAK, DD, dan IPM_{t-1} secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi se-Indonesia. Sedangkan pada model kedua diperoleh nilai *goodness of fit* (R^2) sebesar 0,004172 atau 0,41%, artinya variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Secara parsial, variabel DID berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembentukan IPM. Variabel DAU berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembentukan IPM. Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM. Serta variabel DD berpengaruh positif dan signifikan dalam pembentukan IPM. Sedangkan variabel IPM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dalam pembentukan nilai pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: *Indeks Pembangunan Manusia, DID, DAU, DAK, DD, IPM_{t-1} Pembangunan Nasional, Pertumbuhan Ekonomi*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, dengan kesungguhan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak ada hentinya kepada sang Khalik, sang Maha Pencipta yang telah memberikan nikmat yang luar biasa bagi penulis. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesempatan dan hidayah-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan yang berupa proposal penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Transfer Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan Nasional (Case Study: Kepemimpinan SBY dan JKW)**” dengan sebaik mungkin.

Shalawat berangkaikan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita para umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu, penuh dengan amal dan penuh dengan iman sampai saat sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam proposal ini belum sempurna karena kurangnya kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam merangkai kata-kata menjadi suatu karya tulis yang baik. Oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik untuk menyempurnakan mini riset ini.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **ALLAH SWT.** yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis. Dan atas izin-

Nya Yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua tercinta ayah Alm. Suratno dan mama Zaitun yang telah memberikan kasih sayang, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan dan do'a nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan kelak bisa menjadi orang yang sukses.
3. Untuk papa Bahrumsyah dan ibu Mardiana, yang seperti orang tua saya sendiri atas dukungan dan motivasi serta kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya.
4. Untuk abang dan kakak saya yang tercinta, Sujarwan, Suryanti dan Zairina Astri, yang membantu penulis menyelesaikan penelitian ini dan selalu memotivasi penulis menjadi semangat dan menghibur penulis selama ini.
5. Untuk abang dan kakak saya yang tercinta, Hasbi Azhari, Sofyan Zuhri, dan Arif Hidayat yang selama ini selalu memberikan penulis semangat yang tiada hentinya agar penelitian ini segera selesai serta berpartisipasi membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Januri, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan bimbingan/arahan/kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.

9. Ibu Roswita Hafni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh dosen-dosen yang telah mengajarkan penulis dari semester satu hingga akhir terkhusus dosen-dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama ini.
11. Untuk sahabat-sahabat saya Fitri Larassaty (Ipik), Nurul Fadhillah, Windya S. Octavia, dan seluruh mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2014 terkhusus kelas B selaku sahabat-sahabat terbaik penulis yang selalu menemani, membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Untuk sahabat-sahabat saya, Muammar Rizky (Gembol), Rashid Ridho (Acid), Adnan Khasogi (Ogik), Pino Riza Andika (Herkules), Nida Afifah (Kakak Songonon) dan Mia Audina, serta terkhusus Baladhil Komala yang selalu berbagi cerita bersama dan support yang tiada hentinya.

Penulis mengharapkan semoga Skripsi Penelitian ini memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca secara umum dan menjadi pembelajaran bagi peneliti yang akan meneliti pada pembahasan tersebut serta terkhusus bermanfaat bagi penulis. Akhir kata penulis haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, April 2018

Rizky Ananda

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	23
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah.....	24
1.3.1 Batasan Masalah.....	24
1.3.2 Rumusan Masalah.....	25
1.4 Tujuan Penelitian.....	25
1.5 Manfaat Penelitian.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	27
2.1 Uraian Teoritis.....	27
2.1.1 Teori Pembangunan.....	27
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	31
2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	41
2.1.4 Desentralisasi Fiskal.....	52
2.1.5 Transfer ke Daerah.....	54
2.1.6 <i>Flypaper Effect</i>	56
2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	59
2.2 Penelitian Terdahulu.....	66
2.3 Kerangka Konseptual.....	68
2.4 Hipotesa.....	70
BAB III METODE PENELITIAN	71
3.1 Pendekatan Penelitian.....	71
3.2 Definisi Operasional.....	71
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	73
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	73
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	73
3.6 Model Estimasi.....	74

3.7 Metode Estimasi.....	75
3.8 Tahapan Analisis.....	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	87
4.1 Deskripsi Data.....	88
4.1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.....	88
4.1.2 Perkembangan Variabel yang Mempengaruhi IPM di Indonesia.....	91
4.1.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	101
4.1.4 Statistik Deskriptif.....	104
4.2 Hasil Analisis Regresi.....	106
4.2.1 Penaksiran.....	109
4.2.2 Interpretasi Hasil.....	111
4.2.3 Konstanta dan Intersep.....	113
4.2.4 Uji Statistik.....	116
4.2.5 Uji Asumsi Klasik.....	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2 Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1-1 Perbandingan GNI per Kapita Beberapa Negara Berkembang, Inggris, dan Amerika Serikat Menggunakan Nilai Tukar Resmi dan Konversi Paritas Daya Beli, 2008.....	6
Tabel 1-2 Perkembangan Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Indonesia Tahun 2010 – 2016.....	10
Tabel 1-3 Indikator Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2005 – 2016.....	13
Tabel 1-4 Angka Kematian Bayi Menurut Provinsi Tahun 1971 – 2012.....	16
Tabel 1-5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2010 – 2016 (Metode Baru).....	18
Tabel 2-1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM (2005).....	65
Tabel 2-2 Penelitian Terdahulu.....	66
Tabel 3-1 Definisi Operasional.....	72
Tabel 4-1 Statistik Deskriptif Model IPM.....	104
Tabel 4-2 Statistik Deskriptif Model Pertumbuhan Ekonomi.....	105
Tabel 4-3 Regresi Berganda Model IPM.....	106
Tabel 4-4 Logaritma Natural Model IPM.....	107
Tabel 4-5 Autoregressive of Model IPM.....	108
Tabel 4-6 Regresi Berganda Model Pertumbuhan Ekonomi.....	109
Tabel 4-7 Uji Hausman.....	120

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2-1	Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	45
Gambar 2-2	Kurva Peacock dan Wiseman.....	47
Gambar 2-3	Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave.....	48
Gambar 2-4	Pengukuran Pembangunan Manusia.....	64
Gambar 2-5	Bagan Konseptual Model.....	68
Gambar 2-6	Kerangka Konseptual Model.....	69
Gambar 3-1	Kriteria Pengujian Hipotesa.....	81
Gambar 3-2	Kriteria Pengujian Hipotesa.....	82
Gambar 4-1	Perkembangan IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2016.....	90
Gambar 4-2	Perkembangan Dana Insentif Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2016.....	92
Gambar 4-3	Perkembangan Dana Alokasi Umum Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2016.....	94
Gambar 4-4	Perkembangan Dana Alokasi Khusus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2016.....	98
Gambar 4-5	Perkembangan Dana Desa Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2016.....	100
Gambar 4-6	Perkembangan IPM di Indonesia Tahun 2005-2016.....	102
Gambar 4-7	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2016.....	103
Gambar 4-8	Scatterplot Model IPM.....	118
Gambar 4-9	Scatterplot Model Pertumbuhan Ekonomi.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan umat manusia di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, agenda pembangunan beralih dari sebelumnya yang hanya difokuskan pada pemberantasan kemiskinan termasuk dampak yang ditimbulkannya, sebagaimana tercantum pada tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goal's* atau selanjutnya disebut MDG's) tahun 2015 kepada tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustaibanle Development Goal's* atau selanjutnya disebut SDG's). *Sustainable Development* atau diistilahkan dengan pembangunan berkelanjutan menawarkan konsep inklusif berjangka panjang dalam pengelolaan ekonomi dengan menyelaraskan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial.

Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep SDG's lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara *universal* serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi; yang di mana dapat menjamin masa depan dunia dan umat manusia menjadi lebih baik lagi. Prinsip dalam pelaksanaan SDG's ini merupakan: "*No One Will be Left Behind*" yang dimana Pelaksanaan Pembangunan harus memberi manfaat untuk semua (UNDP:2015).

SDG's ini terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator yang direncanakan dapat dicapai selama 15 tahun sampai dengan 2030 yang akan menjadi tuntutan kebijakan dan pendanaan selama 15 tahun tersebut. Untuk merubah tuntutan ini menjadi aksi nyata, para pemimpin dunia memulai agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Yang dimana 17 tujuan SDG's tersebut adalah (UNDP: 2015):

1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

2) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*)

Menggalakkan hidup sehat & mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)

Memastikan pendidikan yang berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5) Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan, dan pekerjaan yang layak untuk semua.

9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)

Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.

10) Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)

Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

11) Kota dan Komunitas Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan.

12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

13) Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)

Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

14) Ekosistem Laut (*Life Below Water*)

Perlindungan dan penggunaan Samudera, Laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

15) Ekosistem Darat (*Life on Land*)

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institution*)

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan pembangunan tidak terlepas dari peran penduduk atau masyarakat, karena penduduk merupakan titik sentral kegiatan pembangunan. Pembangunan tidak semata-mata diartikan sebagai kegiatan yang menekankan pada aspek fisik saja, tetapi pembangunan harus bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sehingga pembangunan ini dapat mengangkat kualitas hidup masyarakat. Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa terdapat tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dalam pembangunan (Todaro dan Smith, 2011:25):

1. Kecukupan (*Sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar misalnya barang dan layanan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia pada tingkat paling minimum.

2. Harga Diri (*Self Esteem*) : perasaan berharga yang dinikmati suatu masyarakat jika sistem dan lembaga sosial, politik, dan ekonominya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti kehormatan, martabat, integritas, dan kemandirian.
3. Kebebasan (*Freedom*) : situasi yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat memiliki berbagai alternatif untuk memuaskan keinginannya dan setiap orang dapat mengambil pilihan riil yang sesuai dengan keinginannya.

Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) telah menggunakan indikator pendapatan per kapita untuk melihat dan membandingkan kinerja perekonomian negara-negara diseluruh dunia. Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan beberapa pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Indikator ini tidak dapat menjelaskan situasi ketimpangan pendapatan dalam sebuah masyarakat atau bangsa. Sebagai indikator pemerataan, Bank Dunia (*World Bank*) menggunakan ukuran 20% dari penduduk lapisan paling atas yang dapat menikmati pendapatan nasional, dibandingkan dengan 20% dari penduduk lapisan paling bawah. Struktur pendapatan dari masyarakat dapat juga diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu: 40% tingkat bawah, 40% tingkat menengah, dan 20% tingkat atas (Todaro dan Smith, 2011:55).

Tabel 1-1**Perbandingan *Gross National Income (GNI)* Per Kapita Beberapa Negara Berkembang, Inggris, dan Amerika Serikat Menggunakan Nilai Tukar Resmi Dan Konversi Paritas Daya Beli, 2008**

Negara	GNI Per Kapita (\$ AS)	
	Nilai Tukar	Paritas Daya Beli
Argentina	7.190	13.990
Banglades	520	1.450
Brazil	7.300	10.070
Burundi	140	380
Kamerun	1.150	2.170
Cile	9.370	13.240
Cina	2.490	6.010
Kosta Rika	6.060	10.950
Ghana	630	1.320
Guatemala	2.680	4.690
India	1.040	2.930
Indoneisa	1.880	3.590
Kenya	730	1.550
Malawi	280	810
Malaysia	7.250	13.730
Meksiko	9.990	14.340
Nikaragua	1.080	2.620
Siera Leone	320	770
Korea Selatan	21.530	27.840
Sri Lanka	1.780	4.460
Thailand	3.670	7.760
Uganda	420	1.140
Inggris	46.040	36.240
Amerika Serikat	47.930	48.430
Venezuela	9.230	12.840
Zambia	950	1.230

Sumber: Bank Dunia, *World Development Indicators, 2010* (Washington, D.C.: World Bank, 2010)

Perbandingan *GNI* per kapita antar negara maju dan negara dunia ketiga seperti yang terlihat pada tabel 1-1 semakin lebar dikarenakan penggunaan nilai tukar valuta asing resmi untuk mengkonversi nilai mata uang nasional kedalam bentuk dolar AS. Konversi ini tidak mengukur daya beli domestik relatif dalam berbagai mata uang yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, para peneliti telah

berusaha membandingkan *GNI* dan *GDP* relatif dengan menggunakan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity – PPP*) dibandingkan nilai tukar sebagai faktor konversi (Todaro dan Smith, 2011:56). Sebagai contoh, *GNI* per kapita Cina pada tahun 2008 hanya 6% dibandingkan dengan *GNI* per kapita Amerika Serikat dengan menggunakan konversi nilai tukar, tetapi meningkat menjadi 13% jika diukur dengan metode konversi *PPP*. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan antara negara kaya dan miskin cenderung berkurang jika menggunakan *PPP*.

Pembangunan hakekatnya merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan upaya dalam meningkatkan kapasitas pemerintah secara profesional untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta dapat mengelola sumber daya didalamnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta upaya yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pencapaian kesejahteraan tersebut dapat tercermin dari adanya peningkatan kualitas standar hidup yang semakin baik bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupannya yang meliputi pada aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan nasional diarahkan untuk mendukung upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan cara

melakukan pembangunan daerah dan desa sebagaimana merupakan suatu agenda utama pemerintahan. Pembangunan daerah merupakan salah satu rangkaian dasar keberhasilan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan nasional dilaksanakan sendiri oleh masyarakat yang terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai nasional, dan tingkat global, internasional pembangunan antar negara bangsa.

Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan. Capaian tersebut menghasilkan perbaikan dan peningkatan taraf hidup yang signifikan di berbagai bidang pembangunan nasional. Setelah meraih pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, banyak negara di Asia telah naik status masuk kedalam kelompok negara berpenghasilan menengah (*Middle Income Countries – MIC*), seperti Philipina, India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos dan Indonesia. Pergeseran dari status negara berpenghasilan rendah menjadi menengah, akan serta merta memberikan dampak

yang cepat kepada jumlah total agregat permintaan dan penawaran pada negara Indonesia (Egawa:2013).

Pada level tertentu, negara berpendapatan menengah akan menjadi tidak kompetitif pada sektor industri bernilai tambah (*value added industry*), seperti manufaktur. Industri padat karya akan mulai berpindah ke negara berupah rendah sehingga pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut akan cenderung stagnan atau bahkan menurun. Negara berpenghasilan menengah (MIC) tidak hanya mengalami kesulitan untuk bersaing dengan *low-wage countries*, tapi juga kesulitan untuk bersaing dengan *high-technology countries*, (Paus:2011). Fenomena tersebut dikenal dengan perangkap pendapatan menengah (*Middle Income Trap – MIT*). Terdapat beberapa faktor yang umumnya menyebabkan suatu negara masuk kedalam MIT. Beberapa studi menyebutkan bahwa faktor rendahnya dukungan infrastruktur, ketidakberdayaan membangun kemandirian pangan serta perlindungan sosial merupakan faktor penyebab selain tentunya faktor Sumber Daya Manusia (SDM), birokrasi, dan supremasi hukum yang juga menjadi faktor penentu.

Saat ini, besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia per kapita mencapai USD 4.790, yang membuat Indonesia masuk kedalam kelompok *lower middle income countries*. Negara yang tergolong dalam level ini, akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk beralih menjadi negara berpenghasilan tinggi dengan tingkat PDB per kapita lebih dari USD 11.750 (*World Bank*). Namun, banyak negara mengalami kesulitan untuk mencapai target tersebut bahkan mengalami stagnasi dalam pertumbuhan PDB-nya, dimana hal ini

diakibatkan oleh salah satunya peningkatan biaya tenaga kerja serta penurunan produktivitas. Terkait dengan hal itu, Indonesia kini sedang berpacu dengan waktu dalam rangka meningkatkan sektor manufakturnya dan berupaya memperkuat *supply-side-economy*-nya, guna menghindari dari perangkap tersebut.

Tabel 1-2

Perkembangan Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Indonesia Tahun 2010 – 2016

Rincian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDB (Milyar Rupiah)	6.864.133,1	7.287.635,3	7.727.083,4	8.156.497,8	8.564.866,6	8.982.511,3	9.433.034,4
PDB per Kapita (Ribu Rupiah)	28.778,2	30.115,4	31.484,5	32.781,0	33.965,4	35.161,9	36.462,5
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Juta Orang)	238,5	242,0	245,4	248,8	252,2	255,5	258,7

Sumber: BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Salah satu prasyarat utama agar Indonesia dapat bermigrasi ke negara dengan klasifikasi pendapatan tinggi adalah kuatnya kapabilitas industri. Industri yang kuat akan secara langsung memperbaiki struktur neraca perdagangan dan pola penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita (Bank Indonesia:2013). Selama beberapa kurun waktu terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara dengan rata-rata 6% per tahun selama periode 2009 sampai dengan 2013, inflasi juga dapat dikendalikan pada level rata-rata 6% sampai dengan 7%. Selain itu, dua lembaga *credit rating agencies* juga telah meningkatkan level Indonesia menjadi *Investment-grade level*. Namun demikian,

banyak pihak yang menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut hanya dikendalikan oleh sektor jasa dan komoditas, tidak melalui sektor manufaktur (*Asian Development Bank*).

Namun demikian, berdasarkan data *World Bank* disebutkan bahwa Indonesia saat ini masih berada pada peringkat 128 dari keseluruhan 185 negara yang di survey dalam kriteria kemudahan melakukan bisnis (*ease of doing business*). Posisi Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Philipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir prioritas utama Indonesia haruslah berupaya untuk memperbaiki iklim investasi.

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk beralih menjadi HIC, karena didukung oleh beberapa faktor seperti: fundamental ekonomi yang baik, Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, dan juga jumlah populasi penduduk yang besar. Secara demografis, Indonesia didukung oleh tingginya jumlah kelompok usia kerja yang dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data *World Bank*, lebih dari 60% total populasi penduduk Indonesia berusia dibawah 39 tahun, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang signifikan. Studi Bank dunia (*world bank*) menyebutkan bahwa pola demografi dengan banyaknya jumlah proporsi penduduk usia produktif memberikan sejumlah *demografic dividen* bagi Indonesia karena faktor tersebut dapat membantu kinerja perekonomian. Namun demikian, disebutkan juga bahwa Indonesia tidak akan bisa melompat menjadi HIC apabila hanya bergantung pada SDA dan murah nya harga tenaga kerja.

Pertumbuhan Indonesia sangat menjanjikan, namun tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa faktor resiko yang bisa menempatkan Indonesia kedalam perangkap pendapatan menengah. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu memperbaiki sistem ekonomi yang sudah berjalan. Para pembuat kebijakan harus bisa melakukan transformasi struktural dan memunculkan berbagai inovasi guna memperoleh manfaat yang optimal dari sumber pertumbuhan yang ada saat ini. Indonesia tidak bisa lagi hanya bergantung pada SDA serta tenaga kerja murah, karena pada tingkatan tertentu *spillover effect* dari sumber pertumbuhan tersebut akan habis. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pembangunan sistem pendidikan menengah dan tersier untuk menghasilkan SDM terampil dan profesional. Dengan demikian, untuk melihat atau mengukur pembangunan yang telah dilakukan maka diperlukan indikator. Indikator tersebut diperlukan sebagai acuan dalam menilai seberapa jauh suatu negara mencapai indikator yang telah ditetapkan. Indikator ini berfungsi sebagai penjelas tentang pola, gejala, dan pengaruh yang sedang terjadi, untuk menentukan hingga taraf mana negara dianggap berhasil, dimulai dari mengukur, menganalisis, hingga mengevaluasi sebuah perencanaan sampai pelaksanaan. Maka dari itu adapun indikator pembangunan nasional ialah seperti yang ada didalam tabel berikut.

Tabel 1-3

Indikator Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2005 – 2016

Indikator Tahun	Pendapatan Per Kapita (dalam USD)	Gini Rasio (persen)	Kemiskinan (persen)	IPM (persen)
2005	-	0,355	-	69,57
2006	-	-	-	70,10
2007	1.861	0,376	16,58	70,59
2008	2.168	0,368	15,42	71,17
2009	2.263	0,367	14,15	71,76
2010	3.167	0,378	13,33	66,53
2011	3.688	0,399	12,49	67,09
2012	3.741	0,412	11,81	67,70
2013	3.528	0,410	11,42	68,31
2014	3.442	0,41	11,11	68,90
2015	3.329	0,405	11,18	69,55
2016	3.603	0,396	10,78	70,18

Sumber: World Bank (www.worldbank.org) dan Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan diolah

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwasannya indikator dalam pembangunan nasional ada empat. Yang pertama pendapatan per kapita yang dimana merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dilihat dari *Gross National Product* (GNP) maupun melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan yaitu: indikator ini mengabaikan beberapa pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Tabel 1-3 menunjukkan tingkat pendapatan per kapita Indonesia (dalam USD) yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan mulai dari \$ 1.861 di tahun 2007 hingga mencapai \$

3.603 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin baik. Namun hal ini membuat Indonesia masuk ke dalam *middle income trap*.

Indikator yang kedua merupakan Gini Rasio yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dalam sebuah negara/masyarakat. Penggunaan indeks dan ukuran pemerataan kesejahteraan perlu dipertimbangkan, karena menurut para ahli pada awal terjadinya pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin, tidak akan memperbaiki status kaum miskin. Pada tahap awal pembangunan, yang akan memperoleh keuntungan dan menikmati hasil-hasilnya adalah mereka yang berada dalam kelompok berpenghasilan tinggi dan menengah. Sedangkan mereka yang di dalam kelompok berpenghasilan rendah akan tetap tertinggal sampai pada tahap pembangunan tertentu dalam kurun waktu yang lama. Indeks Gini Rasio ini dapat diukur melalui Kurva Lorenz. Koefisien gini berkisar antara 0 – 1 yang dimana jika koefisien gini memiliki nilai 0 berarti terjadi pemerataan yang sempurna dan jika nilai koefisien gini 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna. Dari tabel I-3 dapat kita lihat bahwasannya gini rasio di Indonesia berkisar di angka 0,3. Namun di tahun 2012 gini rasio mengalami peningkatan menjadi 0,412 hingga tahun 2015 nilai koefisien gini masih berada di angka 0,405 namun di tahun 2016 angka gini rasio Indonesia turun menjadi 0,396. Hal ini membuktikan bahwasannya Indonesia mengalami tingkat pemerataan yang baik walaupun belum mencapai taraf sempurna (Todaro dan Smith,2011:255-257).

Indikator yang ketiga adalah kemiskinan yang dimana kemiskinan juga merupakan indikator penting dalam pembangunan nasional. Ada asumsi yang

mengatakan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan tingkat pendapatan per kapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan dan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembangunan dunia yang tercantum dalam MDG's dan juga SDG's. Dengan demikian sudah berarti untuk melakukan pembangunan nasional dengan baik maka yang perlu diperhatikan adalah tingkat kemiskinan. Dari tabel I-3 dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun persentase kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Di tahun 2007, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 16,58% dari seluruh total penduduk di tahun tersebut, kemudian terus mengalami penurunan-penurunan. Walaupun penurunan yang terjadi tidak signifikan, namun di tahun 2016 tingkat kemiskinan di Indonesia hanya sebesar 10,78% dari total penduduk Indonesia. Walaupun persentase kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan, namun jika terus diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang maka, penurunan tingkat kemiskinan tersebut hanyalah sebuah angka namun tidak diikuti dengan penurunan secara riil di masyarakat Indonesia.

Indeks kualitas hidup juga merupakan salah satu faktor yang menentukan pembangunan nasional. Indeks Kualitas Hidup/IKH (*Physical Quality of Life Index/PQLI*) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini membuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada:

- a. Angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun
- b. Angka kematian bayi
- c. Angka melek huruf

Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya.

Tabel 1-4

Angka Kematian Bayi Menurut Provinsi Tahun 1971 – 2012

Provinsi	Angka Kematian Bayi									
	1971	1980	1990	1994	1997	2000	2002	2007	2010	2012
Aceh	143	93	58	58	46	40	-	25	28	47
Sumatera Utara	121	89	61	61	45	44	42	46	26	40
Sumatera Barat	152	121	74	68	66	53	48	47	30	27
Riau	146	110	65	72	60	48	43	37	23	24
Jambi	154	121	74	60	68	53	41	39	29	34
Sumatera Selatan	155	102	71	60	53	53	30	42	25	29
Bengkulu	167	111	69	74	72	53	53	46	28	29
Lampung	146	99	69	38	48	48	55	43	23	30
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	53	43	39	27	27
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	43	20	35
DKI Jakarta	129	82	40	30	26	25	35	28	14	22
Jawa Barat	167	134	90	89	61	57	44	39	26	30
Jawa Tengah	144	99	65	51	45	44	36	26	21	32
DI Yogyakarta	102	62	42	30	23	25	20	19	16	25
Jawa Timur	120	97	64	62	36	48	43	35	25	30
Banten	-	-	-	-	-	66	38	46	24	32
Bali	130	92	51	58	40	36	14	34	20	29

Provinsi	Angka Kematian Bayi									
	1971	1980	1990	1994	1997	2000	2002	2007	2010	2012
Nusa Tenggara Barat	221	189	145	110	111	89	74	72	48	57
Nusa Tenggara Timur	154	128	77	71	60	57	59	57	39	45
Kalimantan Barat	144	119	81	97	70	57	47	46	28	31
Kalimantan Tengah	129	100	58	16	55	48	40	30	23	49
Kalimantan Selatan	165	123	91	83	71	70	45	58	34	44
Kalimantan Timur	104	100	58	61	51	40	42	26	21	21
Sulawesi Utara	114	93	63	66	48	28	25	35	25	33
Sulawesi Tengah	150	130	92	87	95	66	52	60	45	58
Sulawesi Selatan	161	111	70	64	63	57	47	41	31	25
Sulawesi Tenggara	167	116	77	79	78	53	67	41	40	45
Gorontalo	-	-	-	-	-	57	77	52	56	67
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-		na	74	48	60
Maluku	143	123	76	68	30	61	na	59	45	36
Maluku Utara	-	-	-	-	-	75	na	51	40	62
Papua Barat	-	-	-	-	-		na	36	28	74
Papua	86	105	80	61	65	57	na	41	19	54
INDONESIA	145	109	71	66	52	47	43	39	26	34

Sumber: Badan Pusat Statistika (www.bps.go.id) dan diolah

Dari tabel 1-4 dapat dilihat bahwasannya angka kematian bayi di Indonesia dari tahun 1971 sampai dengan 2012 selalu mengalami penurunan, di tahun 1971 angka kematian bayi menyentuh angka 145 sedangkan di tahun 2012 angka kematian bayi hanya berkisar pada angka 34. Hal ini menunjukkan bahwasannya adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari meningkatnya gizi ibu dan anak, meningkatnya derajat kesehatan dan menunjukkan adanya lingkungan keluarga yang sehat dan terjaga.

Indikator yang terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia/IPM (*Human Development Index – HDI*). *The United Nations Development Program* (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut *The*

United Nations Development Program (UNDP), pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang untuk menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap sangat menentukan dalam pembangunan, yaitu:

- a. Rata-rata lama sekolah (*Scholling years*)
- b. Pendapatan per kapita (*Income per capita*)
- c. Angka harapan hidup (*Life expectation*)

Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge*, *Attitude*, dan *Skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

Tabel 1-5

**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia
Tahun 2010 – 2016 (Metode Baru)**

Provinsi / Kabupaten / Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	67.09	67.45	67.81	68.30	68.81	69.45	70
Sumatera Utara	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70
Sumatera Barat	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73
Riau	68.65	68.90	69.15	69.91	70.33	70.84	71.20
Jambi	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89	69.62

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sumatera Selatan	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46	68.24
Bengkulu	65.35	65.96	66.61	67.50	68.06	68.59	69.33
Lampung	63.71	64.20	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65
Kep. Bangka Belitung	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05	69.55
Kep. Riau	71.13	71.61	72.36	73.02	73.40	73.75	73.99
DKI Jakarta	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99	79.60
Jawa Barat	66.15	66.67	67.32	68.25	68.80	69.50	70.05
Jawa Tengah	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98
DI Yogyakarta	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38
Jawa Timur	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95	69.74
Banten	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96
Bali	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27	73.65
Nusa Tenggara Barat	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19	65.81
Nusa Tenggara Timur	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67	63.13
Kalimantan Barat	61.97	62.35	63.41	64.30	64.89	65.59	65.88
Kalimantan Tengah	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77	68.53	69.13
Kalimantan Selatan	65.20	65.89	66.68	67.17	67.63	68.38	69.05
Kalimantan Timur	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59
Kalimantan Utara	-	-	-	67.99	68.64	68.76	69.20
Sulawesi Utara	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39	71.05
Sulawesi Tengah	63.29	64.27	65	65.79	66.43	66.76	67.47
Sulawesi Selatan	66	66.65	67.26	67.92	68.49	69.15	69.76
Sulawesi Tenggara	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07	68.75	69.31
Gorontalo	62.65	63.48	64.16	64.70	65.17	65.86	66.29
Sulawesi Barat	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24	62.96	63.60
Maluku	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74	67.05	67.60
Maluku Utara	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91	66.63
Papua Barat	59.60	59.90	60.30	60.91	61.28	61.73	62.21
Papua	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05
INDONESIA	66.53	67.09	67.70	68.31	68.90	69.55	70.18

Sumber: Badan Pusat Statistika (www.bps.go.id) dan diolah

Dari tabel 1-5 di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2016

berkisar diangka 66 sampai 70. Yang dimana dari tahun ke tahunnya selalu mengalami perkembangan walaupun tidak secara signifikan. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) antar provinsi, masih banyak ditemukan *gap* (ketimpangan) untuk provinsi-provinsi yang sudah mandiri dengan yang belum mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan belum dilakukan secara merata.

Beberapa ahli demografi berpendapat, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikarenakan adanya disparitas akses terhadap hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Adakalanya penyebabnya juga karena proses suatu kegiatan peningkatan pembangunan yang tidak tepat. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan yang merata antar provinsi di Indonesia, diperlukannya campur tangan pemerintah pusat melalui kebijakan mekanisme transfer ke daerah (TkD). Hal ini bejalan sejak Indonesia resmi mengimplementasikan pola otonomi daerah dari sisi kewenangan serta desentralisasi fiskal dari sisi keuangannya mulai dari 1 Januari 2001 hingga saat ini. Pengelolaan dana daerah harus dilakukan secara baik, efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan nasional. Sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan kepada daerah, pemerintah juga wajib mengalihkan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *Money Follow Function*. Selain penyerahan sumber-sumber pembiayaan tersebut kepada daerah, pemerintah juga memberikan kebebasan kepada daerah untuk menciptakan sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan hukum nasional yang berlaku. Namun dengan demikian, heterogenitas daerah di Indonesia sangat beragam, beberapa daerah memiliki kekayaan Sumber Daya

Alam (SDA) yang luar biasa, dan beberapa daerah lainnya memiliki sumber pajak yang besar. Namun hampir sebagian besar daerah lainnya yang tidak memiliki kekayaan Sumber Daya Alam maupun sumber pajak yang memadai sehingga pemerintah harus ikut campur tangan dalam membantu daerah tersebut melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TkD).

Sebagai sebuah mekanisme penyeimbang, idealnya besaran TkD ini akan berkurang seiring dengan meningkatnya aspek kemandirian di daerah. Namun pada kenyataannya, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan, setiap tahunnya besaran TkD terus meningkat. Berdasarkan data pemerintah (Kemenkeu), di tahun 2015 alokasi TkD mencapai Rp 623,1 Triliyun. pada tahun 2016 alokasi TkD mencapai Rp 710,3 Triliyun, sedangkan di tahun 2017 ini alokasi TkD mencapai Rp 764,9 Triliyun. Untuk tahun 2018 rencana alokasi TkD mencapai Rp 766,2 Triliyun. Dengan data alokasi TkD tersebut, tujuan penciptaan kemandirian di daerah semakin jauh dari yang diharapkan. Ruang fiskal APBD yang sedianya dialokasikan untuk belanja pembangunan dan infrastruktur, semakin lama semakin mengecil dan tidak signifikan dalam mengentaskan masalah pembangunan, kemiskinan serta ketimpangan di daerah.

Transfer ke Daerah (TkD) dalam APBN terdiri dari: Dana Perimbangan (Daper) dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (Otsus). Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), di tahun 2015 sebesar Rp 362,9 Triliyun, untuk tahun 2016 sebesar Rp 19,4 Triliyun, pada tahun 2017 sebesar Rp 40,1 Triliyun sedangkan rencana di tahun 2018 sebesar Rp 40,14 Triliyun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di tahun 2015 sebesar Rp 35,8

Triliyun, untuk tahun 2016 sebesar Rp 23,8 Triliyun, pada tahun 2017 sebesar Rp 58,3 Triliyun sedangkan rencana di tahun 2018 sebesar Rp 62,4 Triliyun. Secara filosofi DAU dan DAK digunakan sebagai alat pemerataan antardaerah (horizontal imbalance) sedangkan DBH digunakan sebagai pemerataan fiskal antara pusat dan daerah sekaligus sebagai koreksi atas pengeksploitasian SDA masing-masing daerah (Kemenkeu).

Transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah dilaporkan tidak terkendali karena ada kesalahan dalam penetapan jumlahnya. Akibatnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan ada penyimpangan penggunaan sebagian dana perimbangan yang bisa merugikan keuangan negara. Dana perimbangan pusat dan daerah sangat berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sangat sensitif. Jika tidak berhati-hati dalam mengelolanya, bisa rawan penyalahgunaan. Berdasarkan data Kemenkeu, pada tahun 2011 terdapat 124 daerah yang 50% lebih anggarannya dialokasikan untuk belanja pegawai, jumlahnya meningkat menjadi 302 daerah pada APBD 2012, bahkan 16 daerah diantaranya menganggarkan belanja pegawainya di atas 70%.

Dari tahun ke tahun, proporsi dana transfer daerah tidak bergerak jauh dikisaran 31% dari total belanja negara. Secara nilai riil, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8% dan inflasi 4,9%, pertumbuhan transfer daerah sebesar 8,4% tidak berarti penambahan yang signifikan. Berdasarkan prinsip *money follow function*, transfer daerah justru berbanding terbalik dengan urusan yang didesentralisasikan. Sebanyak 31 urusan pemerintah atau 70% urusan

pemerintah di serahkan ke daerah, sementara dari segi proporsi anggaran yang ditransfer dikisaran 30%.

Dengan postur anggaran seperti yang disebutkan di atas, tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik akan sulit dicapai, meski otonomi daerah telah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu pengawasan dan kebijakan yang lebih ketat terhadap mekanisme transfer daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan penggunaan mekanisme transfer ke daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan melihat bagaimana hubungan yang ditimbulkan antara mekanisme transfer ke daerah dengan pembangunan nasional. Untuk itu, penelitian ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Transfer Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan Nasional (*Case Study*: Kepemimpinan SBY dan JKW)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka didapat beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ruang fiskal APBD yang dialokasikan untuk belanja pembangunan dan infrastruktur semakin rendah sehingga tidak optimal dalam mengentaskan masalah pembangunan, kemiskinan serta ketimpangan di daerah.

2. Rata-rata proporsi dana transfer ke daerah hanya bergerak di kisaran 31 % dari total belanja negara pertahun sehingga pemanfaatan tidak optimal dalam pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, dan *life expectation* untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
3. Transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah tidak terkendali karena ada kesalahan dalam penetapan jumlahnya sehingga dapat menyebabkan penyimpangan dalam tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik akan sulit dicapai.
4. Tujuan penciptaan kemandirian di daerah melalui alokasi transfer dana ke daerah semakin jauh dari yang diharapkan dikarenakan banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam hal keuangan untuk melakukan pembangunan.
5. Besarnya anggaran belanja pemerintah pusat terhadap penerimaan daerah tidak semerta-merta meningkatkan kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Ada banyak masalah yang bisa diangkat dari penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah. Jadi penelitian ini hanya dibatasi pada masalah seberapa besar

Transfer Daerah khususnya dana Perimbangan mampu mempengaruhi tingkat pembangunan nasional dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

pasca kebijakan otonomi daerah se-Provinsi di Indonesia dalam periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (2005 – 2016).

1.3.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan *Human Development Index* (HDI) dan Transfer Daerah masa kepemimpinan SBY dan JKW tahun 2005 - 2016 di Provinsi se-Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh nilai transfer daerah dengan *Human Development Index* (HDI) se-Provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisa deskriptif tentang perkembangan HDI dan transfer ke daerah masa kepemimpinan SBY dan JKW tahun 2005 - 2016 di Provinsi se-Indonesia.
2. Melakukan estimasi pengaruh yang ditimbulkan dari transfer daerah dalam mengembangkan *Human Development Index* (HDI) se-Provinsi di Indonesia.
3. Melakukan estimasi pengaruh yang ditimbulkan belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia di sektor keuangan negara dan pembangunan nasional maupun kalangan masyarakat umum. Manfaat yang dapat diambil diantaranya:

1.5.1 Manfaat Akademik

a. Bagi peneliti:

- (1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
- (2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi mahasiswa:

- (1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
- (2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.5.2 Manfaat Non-akademik

- a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Pembangunan

Pembangunan secara luas dapat didefinisikan sebagai proses perbaikan dari suatu masyarakat yang berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sedangkan secara umum pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi dari struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat dari peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di berbagai sektor. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2006:28).

Konsep pembangunan merupakan proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu (Todaro dan

Smith, 2011:6). Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (*gross national income – GNI*) per kapita “riil” sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan-seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro dan Smith, 2011:16).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro dan Smith, 2011:17).

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa ada yang sangat salah dengan pengertian pembangunan yang sempit itu. Kini semakin banyak ekonom dan pembuat kebijakan yang menyuarakan perlunya upaya serius untuk menanggulangi meluasnya kemiskinan absolut, distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, dan meningkatnya pengangguran.

Singkatnya, dalam dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mulai didefinisi ulang dalam kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang (Todaro dan Smith, 2011:17).

Oleh sebab itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu. Pembangunan seharusnya upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro dan Smith, 2011:18-19)

Terdapat tiga komponen dasar ataupun nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang sesungguhnya. Tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti pembangunan tersebut ialah (Todaro dan Smith, 2011:25-26):

- a. Kecukupan (*sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Semua orang memiliki kebutuhan dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan. Kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupannya ini mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Jika salah satu kebutuhan

dasar tidak terpenuhi atau persediaannya tidak memadai, akan terjadi suatu kondisi “keterbelakangan absolut”.

- b. Harga diri (*self-esteem*) : Menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal kedua bagi adanya kehidupan yang baik adalah harga diri, yaitu suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Denis Goulet, “Pembangunan telah dilegitimasi sebagai tujuan karena merupakan hal yang penting, bahkan mungkin merupakan cara yang sangat berharga untuk meraih harga diri.”
- c. Kebebasan (*freedom*) : kemampuan untuk memilih. Nilai ketiga dan terakhir yang perlu tercakup dalam makna pembangunan adalah konsep kebebasan manusia. Pengertian kebebasan di sini harus dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dari kondisi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material serta kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan, orang lain, penderitaan, lembaga yang represif, dan keyakinan dogmatis, khususnya yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah nasib yang sudah ditakdirkan Tuhan.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses sosial, ekonomi, dan lembaga, memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di

semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut (Todaro dan Smith, 2011:27):

- 1) Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok.
- 2) Peningkatan standar hidup.
- 3) Perluasan pilihan ekonomi dan sosial.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Sedangkan Kuznet (Jhingan, 2000:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus mengikat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang (Sukirno, 2004:435). Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan

masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, bahwa pertumbuhan ekonomi merujuk pada suatu proses untuk memperoleh output, dimana ukuran pencapaian memerlukan jangka panjang.

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ricardo

Ricardo terkenal dengan teori *the law of diminishing returns*. Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka tenaga kerja akan terus bertambah. Hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada akhirnya akan menekankan tingkat upah ke bawah.

Menurut Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing returns* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Proses ini adalah proses tarik menarik antara kekuatan dinamis yaitu kekuatan *the law of diminishing returns* dan kemajuan teknologi. Ricardo memberi penegasan bahwa suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber daya alamnya.

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Teori ini memandang bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Sumber pertumbuhan dapat dibedakan menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja, dan perubahan dalam produktivitas. Perbedaan dalam produktivitas ini menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar negara, sedangkan yang mempengaruhi produktivitas adalah kemajuan teknologi. Dengan mengasumsikan suatu tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan penduduk tertentu, model pertumbuhan Solow-Swan dapat menghasilkan berapa tingkat pendapatan per kapita suatu negara. Bentuk fungsi produksi dalam model pertumbuhan Solow adalah:

$$Q = f(K, L); K, L > 0 \dots\dots\dots(2-1)$$

Pada persamaan di atas Q adalah output bersih sesudah depresiasi, K adalah modal, dan L adalah tenaga kerja. Menurut Romer dan Well (Nazara, 1994:22) model di atas diperbaiki dengan memecah *total factor productivity* dengan cara memasukkan variabel lain yang dapat menjelaskan pertumbuhan. Model pertumbuhan ini selanjutnya disebut dengan model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*). Dalam model pertumbuhan endogen ini dicari variabel yang dapat dimasukkan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Salah satu variabel yang dianggap dapat ikut menjelaskan

pertumbuhan dari suatu ekonomi adalah variabel sumber daya manusia.

Pada tahap selanjutnya, Solow berusaha memasukkan variabel perubahan teknologi dalam model pertumbuhan. Variabel perubahan teknologi ini menggambarkan kondisi pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi, dimana saat teknologi berkembang maka tingkat efisiensi tenaga kerja juga akan naik. Dengan adanya kemajuan teknologi, model Solow akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang dialami oleh berbagai negara. Model Solow menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi *steady-state* dicapai. Dengan penambahan variabel baru ini maka persamaan awal dari Solow berubah menjadi:

$$Y = f(K, L \times E) \dots\dots\dots(2-2)$$

Pada persamaan di atas E adalah variabel baru dari teknologi yang selanjutnya disebut efisiensi tenaga kerja, sedangkan $L \times E$ menunjukkan jumlah tenaga kerja yang efektif. Fungsi produksi yang baru ini menyatakan bahwa jumlah output (Y) adalah tergantung pada jumlah unit modal (K) dan jumlah pekerja yang efektif ($L \times E$).

2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Rostow

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan:

- a. Masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan dan sikap yang masih primitif, dan berfikir irasional.
- b. Prasyarat lepas landas, yaitu suatu masa transisi di mana suatu masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*selfsustained growth*).
- c. Lepas landas, adalah suatu masa di mana berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbentuknya pasar baru.
- d. Tahap kematangan, adalah suatu masa di mana suatu masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alam.
- e. Masyarakat berkonsumsi tinggi, yaitu suatu masyarakat di mana perhatiannya lebih menekankan pada masalah konsumsi

dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi.

2.1.2.5 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Harrod-Domar adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu menurutnya setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar, ada hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal dan jumlah produksi nasional (Arsyad, 1999:58).

2.1.2.6 Teori Pertumbuhan Modern

Menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis yang tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, kelembagaan, dan ideologis. Menurut Kuznet (dalam Jhingan, 2000:73) terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada produk nasional dan komponennya, yaitu:

- 1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita
- 2) Peningkatan produktivitas
- 3) Laju perubahan struktural yang tinggi
- 4) Urbanisasi
- 5) Ekspansi negara maju, dan

6) Arus barang, modal, dan orang antar bangsa

Pada sekitar tahun 1980 Romer memperkenalkan tentang teori pertumbuhan ekonomi baru (*New Growth Theory*). Teori pertumbuhan baru pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen yang lahir sebagai respon dan kritik terhadap model pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik Solow. Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*) menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak. Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen karena menganggap pertumbuhan GNP lebih ditentukan oleh sistem proses produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Motivasi dasar dari teori ini adalah menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan negara dari proporsi yang lebih besar dari pertumbuhan yang diamati.

Persamaan teori endogen dapat dituliskan dengan $Y = A, K$. Dalam formulasi ini, A adalah faktor yang mempengaruhi teknologi,

dan K adalah modal fisik dan modal manusia. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada hasil yang menurun (*diminishing returns*) atas kapital dalam formula tersebut. Akibatnya kemungkinan yang bisa terjadi adalah investasi dalam modal-modal fisik dan manusia dapat menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktivitas yang melebihi penghasilan yang cukup untuk *diminishing returns*. Implikasi dari penekanan terhadap pentingnya tabungan dan investasi pada modal oleh teori ini adalah tidak ada kekuatan yang menyamakan tingkat pertumbuhan antar negara, serta tingkat pertumbuhan nasional yang konstan dan tingkat teknologi. Konsekuensinya, bagi negara yang miskin modal manusia dan fisik sulit untuk menyamai tingkat pendapatan per kapita negara yang kaya kapital. Walaupun memiliki tingkat tabungan nasional yang sama besar.

Rahardja (2001:152) menjelaskan dalam teori ini disebut bahwa teknologi bersifat endogenus. Hal ini karena teknologi dianggap sebagai faktor produksi tetap (*fixed input*) sehingga mengakibatkan terjadinya *The Law of Diminishing Return*. Dalam jangka panjang yang lebih serius dari memperlakukan teknologi sebagai faktor eksogen dan konstan adalah perekonomian yang lebih maju akan terkejar oleh perekonomian yang lebih terbelakang dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat tabungan dan akses terhadap teknologi adalah sama. Teknologi merupakan barang publik. Artinya teknologi dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh

seluruh masyarakat walaupun bukan si penemu teknologi tersebut dan tanpa mengeluarkan biaya riset atau penelitian. Sehingga dalam hal ini teknologi disebut sebagai faktor endogen.

2.1.2.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah/provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (selanjutnya disebut PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Sukirno, 2004:17).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ke tahun.

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB yaitu:

1) Pendekatan produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB dihitung melalui akumulasi nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam 9 lapangan usaha, yaitu:

- a. Pertanian
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik, gas, dan air bersih
- e. Bangunan
- f. Perdagangan, hotel, dan restoran
- g. Angkutan dan komunikasi
- h. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa

2) Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

3) Pendekatan pengeluaran

PDRB adalah semua komponen pengeluaran aktif seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang diperoleh ialah (Kuncoro, 2004:110):

a) PDRB harga berlaku/nominal

1. Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/provinsi. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.
2. Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah/provinsi.

b) PDRB harga konstan

1. Menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun.
2. Mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau/antar provinsi.

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan

tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

2.1.3.1 Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono, 1999):

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

- c. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pembelian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya: pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis *transfer payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama

dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

1) Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke

pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesobroto:2001).

2) Teori Adolf Wagner

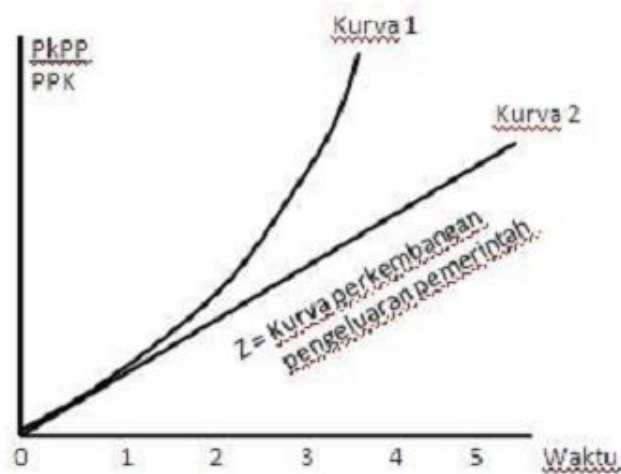
Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesobroto:2001).

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PPkP}{PPK1} < \frac{PkPPn}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn} \dots\dots\dots(2-3)$$

Dimana: PP_kP = Pengeluaran pemerintah perkapita
 PPK = Pendapatan perkapita (GDP/jlh penduduk)
 $1,2,\dots,n$ = jangka waktu (tahun)

Gambar 2-1
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



Sumber: Boediono, 1999

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

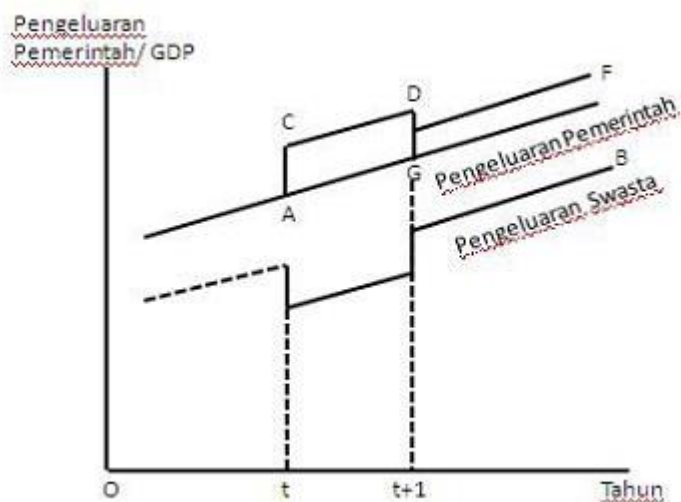
Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat

lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini:

Gambar 2-2
Kurva Peacock dan Wiseman



Sumber: Boediono, 1999

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.

Gambar 2-3
Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave



Sumber: Boediono, 1999

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial,

sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

4) Teori Batas Kritis Colin Clark

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat.

Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25 persen

terlampau maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

2.1.3.2 Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Mangkoesuebrotto:2001).

1) Penentuan Permintaan

$$U^i = f(G, X) \dots\dots\dots(2-4)$$

Dimana: U = Fungsi Utilitas
i = Individu, 1, 2, ..., m
G = Vektor barang pemerintah
X = Vektor barang swasta

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha

untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

2) Penentuan Tingkat Output

$$U_p = g (X, G, S) \dots\dots\dots(2-5)$$

Dimana: U_p = Fungsi Utilitas
 S = keuntungan yang diperoleh politisi
 G = Vektor barang pemerintah
 X = Vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f (X, G) \dots\dots\dots(2-6)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P_x X + t B < M_i \dots\dots\dots(2-7)$$

Dimana: P = Vektor harga barang swasta
 X = Vektor barang swasta
 B_i = Basis pajak individu 1
 M_i = Total pendapatan individu 1
 T = Tarif pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses , yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia

bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*) atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

2.1.4 Desentralisasi Fiskal

2.1.4.1 Pengertian Desentralisasi Fiskal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lain (Kuncuro, 2014:46).

2.1.4.2 Teori Desentralisasi Fiskal

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (sentralisasi) ataukah

didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah *eksternalitas* dan uang, yang kedua ialah *preferensi* (Azwardi dan Abukosim, 2007:3-4).

Selanjutnya Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal (Azwardi dan Abukosim, 2007:4-5), yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman daerah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Dalam implementasi desentralisasi akan terjadi pembagian tugas antara pusat dan daerah. Implikasinya adalah diperlukan sumber pembiayaan yang dapat memenuhi keperluan penyelenggaraan tugas pada masing-masing tingkat pemerintahan tersebut. Penyerahan sumber-sumber ini pembiayaan ini pada dasarnya dimanifestasikan dalam bentuk pemberian beberapa jenis pajak ke daerah dan kebolehan dalam melakukan pinjaman. Ketika sumber pembiayaan tersebut tidak mencukupi untuk pelaksanaan tugas daerah, maka dikenal adanya dana transfer, dimana daerah menerima dana dari pusat untuk menutup kebutuhan fiskalnya atau untuk melaksanakan suatu urusan yang diamanatkan (DSFIndonesia, 2010:6).

Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Adapun tujuan dari transfer ini adalah pemerataan vertikal (*vertical equalization*), pemerataan horizontal

(*horizontal equalization*), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (*correcting spatial externalities*), mengerahkan prioritas (*redirecting priorities*), melakukan eksperimen dengan ide-ide baru, stabilisasi dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) di setiap daerah (Hermawan, 2007:11).

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

2.1.5 Transfer ke Daerah

2.1.5.1 Pengertian Transfer ke Daerah

transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian (Peraturan Kemenkeu RI, Nomor 145/PMK.07/2013).

2.1.5.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas:

- 1) Dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan presentase tertentu demi mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Dana alokasi umum yang selanjutnya disebut DAU, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah demi mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- 3) Dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 4) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di luar UU perimbangan keuangan.

2.1.5.3 Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dana ini dibatasi hanya 20 tahun, yang saat ini untuk Provinsi Papua dan Nangroe Aceh Darussalam.

2.1.5.4 Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.

2.1.6 *Flypaper Effect*

Flypaper Effect diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1997). Istilah ini kemudian dikembangkan oleh Dollery and Worthington (1995) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menggunakan pendapatan transfer untuk memperluas belanja publik daripada pendapatan daerah, baik secara langsung melalui rabat atau tidak langsung melalui dikurangnya pajak. Definisi *Flypaper Effect* menurut Maimunah (2006:37) yaitu:

“*Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD.”

Sementara itu, Gorodnichenko (2011:38) berpendapat bahwa fenomena *flypaper effect* adalah:

“*flypaper effect phenomenon can occur in two versions. Firstly, lead to the increase in local taxes and excessive of goverment budget spending. Secondly, lead to higher elasticity of local goverment expenditure to transfer rather than the elasticity of local goverment expenditure to local text revenue. Those above studies, support the hypothesis of flypaper effect.*”

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi, yaitu:

- 1) Merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan.
- 2) Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian tentang *flypaper effect* dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan dalam dua aliran pemikiran, yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokrasi meneliti *flypaper effect* dari sudut pandang birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

Model birokratik menegaskan *flypaper effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang leluasa untuk membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak. Model ilusi fiskal pertama kali ditemukan oleh ekonom italis bernama Amilcare Puviani yang menggambarkan ilusi fiskal terjadi saat pembuatan keputusan yang memiliki kewenangan dalam suatu institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan (rekayasa) sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu.

Oates (1999) menyatakan fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan iluski fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan

biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah.

Oates (1999) menyatakan fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah.

Pendekatan mengenai *flypaper effect* diresmikan oleh Bradford dan Oates (1971) yang memprediksikan bahwa hibah kepada pemerintah daerah setara dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Pendekatan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap kenaikan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah otonom adalah sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat dari suatu daerah otonom. Alasannya adalah, setiap penerimaan pemerintah yang berasal dari masyarakat harus dialokasikan kepada masyarakat secara sepadan. Hal tersebut berlaku juga terhadap Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan asli daerahnya sendiri yang berasal dari masyarakat daerahnya dengan sepadan. Walaupun dalam praktiknya, dalam memenuhi kebutuhan publik, Pemerintah Daerah masih sangat

mengandalkan transfer yang berasal dari Dana Perimbangan untuk pengeluaran belanjanya. Sehingga seolah menciptakan ilusi fiskal yaitu dimana masyarakat membayar pajak dan mengharapkan mendapatkan kontraprestasi tidak langsung yang sepadan, akan tetapi Pemerintah Daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan publik cenderung merespon lebih besar dari transfer Pemerintah Pusat, bukan dari Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah peningkatan Belanja Daerahnya menjadi tidak sepadan dengan Pendapatan Asli Daerahnya. Selain itu, *flypaper effect* juga mempengaruhi kecenderungan belanja Pemerintah Daerah pada periode selanjutnya sehingga efek tersebut akan berakibat jangka panjang.

Widarjono (2006) menemukan adanya *flypaper effect* pada wilayah barat dan timur Indonesia. Ia menunjukkan bahwa *flypaper effect* yang terjadi di daerah timur (Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Pulau Irian) lebih besar daripada daerah barat (Sumatera dan Jawa). Temuan ini menunjukkan pengaruh transfer (*grants*) terhadap belanja daerah lebih signifikan dibandingkan pengaruh terhadap belanja daerah.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.7.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosial-ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP (*United Nation Development Programme*) yang berjudul *Human Development Report* (laporan Pembangunan Manusia). Inti semua laporan ini, yang dimulai pada tahun 1990,

adalah pembuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*). HDI berusaha memeringkat semua negara dengan skala 0 (pembangunan manusia terendah) sampai 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu: 1) masa hidup (*longevity*) yang diukur melalui harapan hidup setelah lahir. 2) pengetahuan yang diukur dengan bobot rata-rata tingkat melek aksara orang dewasa dan rasio partisipasi sekolah bruto. 3) standar hidup yang diukur berdasarkan produk domestik bruto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap negara yang nilainya berbeda-beda untuk mencerminkan biaya hidup dengan asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun (*diminishing marginal utility*) pendapatan (Todaro dan Smith, 2011:57).

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia (*Human Development*) sebagai upaya untuk menciptakan/memberikan perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*). Konsepsi berpikir ini terbentuk dari pemahaman bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan atau sistem sosial ke arah yang lebih baik, yang dimaknai dengan adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan (*growth*), dan diversifikasi (*diversification*). Perluasan pilihan penduduk yang dimaksud meliputi pilihan untuk berumur panjang dan hidup sehat, berilmu pengetahuan, mempunyai akses terhadap sumber daya yang

dibutuhkan agar dapat hidup secara layak, memiliki kebebasan untuk berpolitik, serta jaminan perlindungan atas hak asasi manusia dan harga diri. Jadi tujuan utama pembangunan manusia adalah memperbanyak pilihan kepada masyarakat untuk bebas memilih sesuatu hal yang diinginkan dan bagaimana cara untuk menjalani hidup (PGSP, 2012:1).

UNDP juga memperkenalkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Pratowo, 2013:16). Indeks Pembangunan Manusia/IPM (*Human Development Index/HDI*) merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro dan Smith, 2011:57).

2.1.7.2 Penggunaan Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan manusia yang dijelaskan dalam PGSP (2012:1) merupakan proses atau kegiatan pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus utama, dan bukan hanya sebagai sasaran akhir dari seluruh kegiatan tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan derajat kesehatan, serta meningkatkan pendidikan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi.

Di dalam PGSP (2012:2), dijelaskan mengenai penggunaan konsep pembangunan manusia. Salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 adalah percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan indikator yang dapat mengkaji kemajuan atau progres pembangunan daerah. Salah satu alternatif untuk mengukur kinerja pembangunan suatu negara atau daerah adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini secara umum menangkap kinerja pembangunan manusia dalam dimensi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Ekonomi

2.1.7.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

a. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

IPM yang diperkenalkan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*), sejak tahun 1990, digunakan untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen dasar manusia yang secara operasional mudah di hitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia, yaitu (PGSP, 2012:51-53):

1) Peluang Hidup (*Longevity*)

Komponen peluang hidup di ukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

2) Pengetahuan (*Knowledge*)

Komponen pengetahuan di ukur dengan (a) indikator melek huruf, yang diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, (b) indikator rata-rata lama sekolah, yang di hitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

3) Standar Hidup Layak (*Decent Living*)

Komponen standar hidup layak di ukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan (*adjusted real Gross Domestic Product – GDP per capita*). Perhitungan ini didasarkan pada *Purchasing Power Parity – PPP* sehingga dapat perbandingan antar negara.

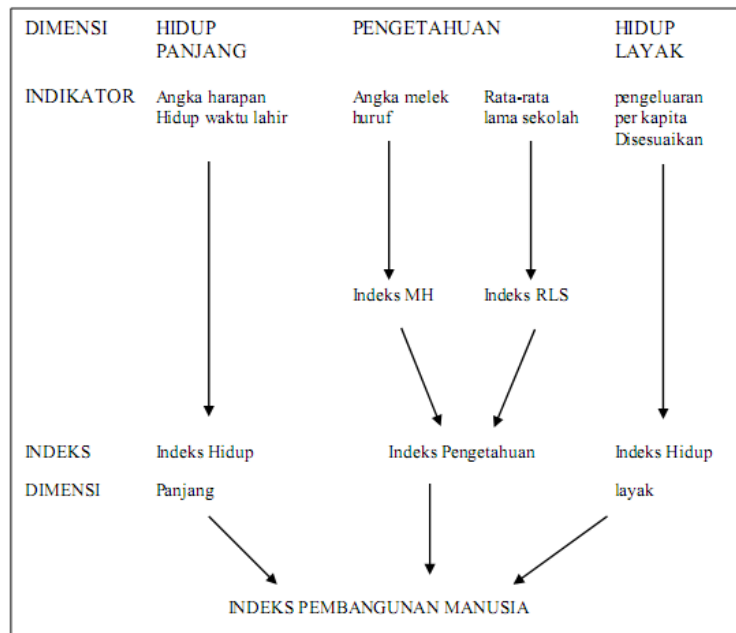
Perhitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:

$$PPP/unit = \frac{\sum_j \sum(i,j)}{\sum_j P(9,j).q(i,j)} \dots\dots\dots(2-8)$$

Dengan: $\sum(i, j)$: pengeluaran konsumsi untuk barang j di Kabupaten i
 $P(9, j)$: harga barang j di Kabupaten
 $q(i, j)$: jumlah barang j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten i

Gambar 2-4

Pengukuran Pembangunan Manusia



Sumber: *Pembangunan Provinsi Gorontalo: perencanaan dengan Indeks Pembangunan manusia, Bappenas+pemerintahan Provinsi Gorontalo, 2010*

b. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Di dalam PGSP (2012:3) Indeks Pembangunan Manusia secara umum menangkap kinerja pembangunan manusia dalam dimensi (i) pendidikan; (ii) kesehatan; (iii) ekonomi. Secara khusus indeks ini merupakan agregasi dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf dan lama sekolah, serta tingkat konsumsi per kapita. Sehingga rumus IPM yang dikutip dari Arizal Ahnaf, dkk dalam PGSP (2012:54) dapat disajikan sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) \dots\dots\dots(2-9)$$

Dimana:

X_1 = Indeks harapan hidup

X_2 = Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)

X_3 = Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = (X_{(i)} - X_{(i) \text{ min}}) / (X_{(i) \text{ maks}} - X_{(i) \text{ min}}) \dots\dots\dots(2-10)$$

Dimana:

$X_{(i)}$ = Indikator ke-i (i = 1,2,3,...,n)

$X_{(i) \text{ min}}$ = Nilai minimum $X_{(i)}$

$X_{(i) \text{ maks}}$ = Nilai maksimum $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan minimum indikator $X_{(i)}$ di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM (2005)

Indikator Komponen IPM ($X_{(i)}$)	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
AHH	85	25	Sesuai standar Global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar Global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar Global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan	732.720 ^{a)}	300.000 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB perkapita riil yang disesuaikan

Sumber: PGSP

Catatan:

- 1) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk provinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 telah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi

mengasumsikan kenaikan 6,5% per tahun selama kurun waktu 1996 – 2018.

- 2) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk provinsi yang memiliki angka terendah tahun 1996 di Papua.

Dalam Pratowo (2013:16), angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar antara 0 – 100, semakin mendekati 100 maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) $IPM \leq 50$ (rendah)
- 2) $50 \leq IPM \leq 80$ (sedang/menengah)
- 3) $IPM \geq 80$ (tinggi)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2-2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian & Nama Peneliti	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya pada Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur Anes Lilia Kusumatuti, S.kom (2012)	OLS	PAD DAU DAK IPM Y	Semua variabel bebas PAD, DAU, DAK berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Tapal Kuda

No.	Judul Penelitian & Nama Peneliti	Metode Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
2.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2009 – 2012	OLS	IPM PAD DBH DAU DAK	Indeks Pembangunan Manusia mampu dijelaskan oleh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan sebesar 38,8% (F-Statistic). Namun, secara parsial menunjukkan bahwa: (1) IPM tidak berpengaruh signifikan dan negatif oleh PAD dan DAK. (2) IPM tidak berpengaruh signifikan dan positif oleh DBH. (3) IPM dipengaruhi dan signifikan dan positif oleh DAU.
	Mutia Irma Damayanti (2014)			
3.	Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur	OLS	IPM PAD DAU DAK DBH PE	Variabel PE mempunyai pengaruh paling dominan terhadap IPM, kemudian berturut-turut variabel DAU, DAK, PAD dan DBH. Variabel DAU menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh negatif terhadap IPM.
	Dectra Pitron Lugastoro (2013)			
4.	Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	OLS	DAU PAD DAK IPM Belanja Daerah	Belanja daerah dan PAD berpengaruh terhadap IPM. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan secara simultan bahwa belanja daerah DAU, DAK, dan PAD berpengaruh terhadap IPM
	Hastu Sarkoro (2016)			

Sumber: Penelitian Terdahulu dan diolah

2.3 Kerangka Konseptual

Secara umum, terdapat beberapa indikator yang dianggap sangat mempengaruhi nilai Transfer Daerah dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu: (1) Dana Insentif Daerah, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana Alokasi Khusus, (4) Dana Desa. Keempat variabel tersebut akan mempengaruhi tingkat pembangunan nasional secara parsial (dilihat dari IPM). Namun, secara simultan pembangunan nasional akan dipengaruhi oleh belanja negara dan tingkat IPM.

2.3.1 Kerangka Analisis Pembangunan Nasional

Gambar 2-5

Bagan Konseptual Model



2.3.2 Model I Kerangka Analisis Pengaruh Transfer Daerah terhadap IPM

Gambar 2-6

Kerangka Konseptual Model

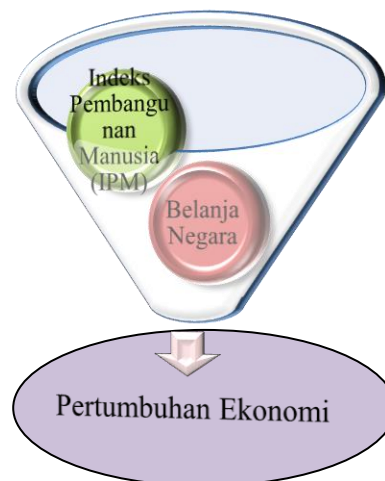
Model 1:



Dalam model ini, variabel DID, DAU, DAK dan DD merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap pertumbuhan IPM, yang dimana IPM merupakan variabel terikat.

2.3.3 Model II Kerangka Analisis Pengaruh Belanja Negara dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Model 2:



Dalam model yang kedua ini, variabel IPM dan Belanja Negara merupakan variabel-variabel bebas yang bersama-sama secara simultan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi yang dalam model ini adalah variabel terikat.

2.4 Hipotesa

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesa sebagai berikut:

1. Di duga terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Desa (DID), dan Dana Desa (DD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Di duga adanya hubungan yang positif dan signifikan antara Belanja Negara dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah mini riset kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antara variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang disajikan adalah *panel data* yaitu dimana penelitian menggunakan data *cross section*, data yang diteliti lebih dari satu; dan *time series*, waktu yang dihimpun pada tahun yang berbeda secara bersamaan. Data yang akan diteliti adalah seluruh Provinsi di Indonesia dan waktu penelitian yang dihimpun adalah pada tahun 2005 sampai 2016 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun variabel-variabel yang akan diamati adalah variabel-variabel yang terdapat pada Indeks Pembangunan Manusia yang dipengaruhi oleh mekanisme Transfer ke Daerah, serta Pembangunan Nasional yang akan dipengaruhi oleh belanja negara dan IPM.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan

data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Desa (DID), Dana Desa (DD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi (PE), serta Belanja Negara (BN), sehingga definisi operasional dari penelitian ini ialah:

Tabel 3-1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Nilai kesejahteraan dalam pemanfaatan DAU, DID, DAK dan DD dalam satuan persen	BPS (Badan Pusat Statistik) – www.bps.go.id
DAU (Dana Alokasi Umum)	Dana APBN untuk kegiatan umum dalam satuan milyar rupiah	Kementerian Keuangan – www.kemenkeu.go.id
DID (Dana Insentif Daerah)	Dana APBN untuk kegiatan daerah dalam satuan milyar rupiah	Kementerian Keuangan – www.kemenkeu.go.id
DAK (Dana Alokasi Khusus)	Dana APBN untuk kegiatan khusus dalam satuan milyar rupiah	Kementerian Keuangan – www.kemenkeu.go.id
DD (Dana Desa)	Dana APBN untuk kegiatan desa dalam satuan milyar rupiah	Kementerian Keuangan – www.kemenkeu.go.id
Belanja Negara (BN)	Dana yang APBN untuk keperluan negara	Kementerian Keuangan – www.kemenkeu.go.id
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Nilai kenaikan ekonomi yang diukur dari IPM dan Belanja Negara	BPS (Badan Pusat Statistik) – www.bps.go.id

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data Transfer ke Daerah di seluruh Provinsi se-Indonesia pada periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai Jokowi (2005 – 2016) yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yaitu November 2017 sampai Januari 2018.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari *website- website* resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), dan data dalam bentuk buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui *website-website* resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dengan objek penelitian seluruh Provinsi di Indonesia dan dengan kurun waktu pemerintahan SBY sampai Jokowi (dari tahun 2005 sampai tahun 2016).

3.6 Model Estimasi

Penelitian ini mengenai pengaruh nilai dari mekanisme Transfer ke Daerah terhadap peningkatan nilai *Human Development Index* dengan objek penelitian seluruh Provinsi di Indonesia dan juga dengan kurun waktu mulai dari pemerintahan SBY sampai Jokowi (dari tahun 2005 sampai tahun 2016) bagi setiap Provinsi di Indonesia. Maka model ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model ekonometrik model I: Pengaruh Transfer Daerah terhadap IPM.

$$IPM_{rt} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot DID_{rt} + \alpha_2 \cdot DAU_{rt} + \alpha_3 \cdot DAK_{rt} + \alpha_4 \cdot DD_{rt} + \varepsilon_{rt} \dots\dots\dots(3-1)$$

Dimana :

IPM_{it}	= Indeks Pembangunan Manusia pada tahun t
r	= Provinsi di Indonesia
t	= Unit waktu (2005-2016)
DID_{rt}	= Dana Insentif Daerah pada tahun t
DAU_{rt}	= Dana Alokasi Umum pada tahun t
DAK_{rt}	= Dana Alokasi Khusus pada tahun t
DD_{rt}	= Dana Desa pada tahun t
α_0	= Konstanta
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$	= Parameter dari setiap variabel bebas
ε_{it}	= <i>Error Term</i>

Berdasarkan variabel ya telah digunakan, bahwasannya Pertumbuhan Ekonomi dapat ditingkatkan melalui IPM bersama-sama dengan Belanja Negara (BN), sehingga akan meningkatkan Pembangunan Nasional (PN), sehingga persamaan ekonometrik kedua dalam penelitian ini yang menggambarkan hubungan antara IPM dan BN terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) adalah:

Model ekonometrik model II: Pengaruh Belanja Negara dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{rt} (BN_{rt}) + \varepsilon_{rt} \dots\dots\dots(3-2)$$

Dimana : PE_{rt} = Pertumbuhan Ekonomi pada tahun t
 IPM_{rt} = Indeks Pembangunan Manusia pada tahun t
 BN_{rt} = Belanja Negara pada tahun t
 E_{rt} = *Error Term*

3.7 Metode Estimasi

Penelitian mengenai implementasi kebijakan transfer daerah terhadap pembangunan nasional se-Provinsi di Indonesia (periode kepemimpinan SBY dan JKW tahun 2005 – 2016). Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika.

Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan model regresi linier untuk model regresi linier dengan asumsi 2SLS (*two stage least square methode*) dalam bentuk model regresi berganda serta menggunakan *Eviews8* yang disajikan lebih sederhana dan mudah dimengerti (Ariefianto:2012).

Asumsi utama yang mendasari model regresi dengan menggunakan metode 2SLS adalah sebagai berikut (ariefianto, 2012):

1. Nilai rata-rata : *disturbance term* = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara *disturbance term* $COV(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 ; i \neq j$
3. Sifat *homoscedasticity* dari *disturbance term* $var(\varepsilon_i) = \sigma^2$
4. *Covariance* antara ε_i dari setiap variabel bebas (x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah di dispesifikasikan atau diformulasikan.
6. Tidak terdapat *collinerity* antara variabel-variabel bebas. Artinya variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.

3.8 Tahapan Analisis

Karena penelitian ini bersifat data panel selama kepemimpinan SBY sampai Jokowi (dari tahun 2005 sampai tahun 2016) dan penelitian ini akan di analisis menggunakan analisis regresi linear berganda (*Two Stage Least Square*).

3.8.1 Analisis Deskriptif perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Transfer ke Daerah kepemimpinan SBY - JKW se-Provinsi di Indonesia.

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Human Development Index (HDI) dan Transfer ke Daerah pasca kebijakan otonomi daerah se-Provinsi di Indonesia pada kepemimpinan SBY dan Jokowi (2005 – 2016).

3.8.2 Analisis Pengujian Regresi

3.8.2.1 Penaksiran

3.8.2.1.1 Korelasi (R)

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya suatu hubungan linier antara variabel DID, DAU, DAK, dan DD terhadap IPM dan variabel IPM dan BN terhadap PE. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi antara -1 sampai $+1$. Nilai r mendekati -1 atau $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda $+$ (positif) dan $-$ (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jika bernilai $+$ (positif) maka variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang searah, dalam arti lain peningkatan DID, DAU, DAK, dan DD akan bersamaan dengan peningkatan IPM serta peningkatan IPM dan BN akan bersamaan dengan peningkatan PE dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai $-$ (negatif) artinya korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan. Penurunan nilai DID, DAU, DAK, dan DD akan bersamaan dengan penurunan IPM

serta penurunan IPM dan BN akan bersamaan dengan penurunan PE dan begitu juga sebaliknya.

3.8.2.1.2 Koefisien Determinasi (D)

Ukuran *Goodness of Fit* mencerminkan seberapa besar variasi dari *regressand* (Y) dapat diterangkan oleh *regressor* (X). Nilai dari *Goodness of Fit* adalah antara 0 dan 1 ($0 \leq 1$). Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Nachrowi dan Usman, 2002).

Sedangkan menurut Gujarati (2006) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (D) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, D menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau adjusted R^2 yang dirumuskan (Gujarati, 2006) :

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - R^2 - \left(\frac{-1}{n-k} \right) \dots\dots\dots(3-3)$$

Dimana: D : koefisien determinan
n : jumlah sampel
k : jumlah variabel independen

3.8.2.2 Pengujian

3.8.2.2.1 Uji Statistik t atau Uji Parsial

Uji t statistik dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh DAK, DID, DAU, dan DD secara individual terhadap IPM. Dalam hal ini pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah-langkah pengujian:

1. Hipotesa:

Model I:

- DID
 - $H_0 : \alpha_1 = 0$ (DID tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia)
 - $H_a : \alpha_1 \neq 0$ (DID berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia)
- DAU
 - $H_0 : \alpha_2 = 0$ (DAU tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia)
 - $H_a : \alpha_2 \neq 0$ (DAU berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia)
- DAK
 - $H_0 : \alpha_3 = 0$ (DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia)
 - $H_a : \alpha_3 \neq 0$ (DAK tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia)
- DD
 - $H_0 : \alpha_4 = 0$ (DD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia)
 - $H_a : \alpha_4 \neq 0$ (DD tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia)

Model II:

- IPM

$H_0 : \beta_1 = 0$ (IPM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi)

$H_a : \beta_1 \neq 0$ (IPM tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi)

- BN

$H_0 : \beta_2 = 0$ (BN berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi)

$H_a : \beta_2 \neq 0$ (BN tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi)

2. Uji statistik t

Dengan cara menghitung nilai t dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\alpha_i}{se \alpha_i} \dots\dots\dots(3-4)$$

dimana: α_i : koefisien regresi
 se : standar error

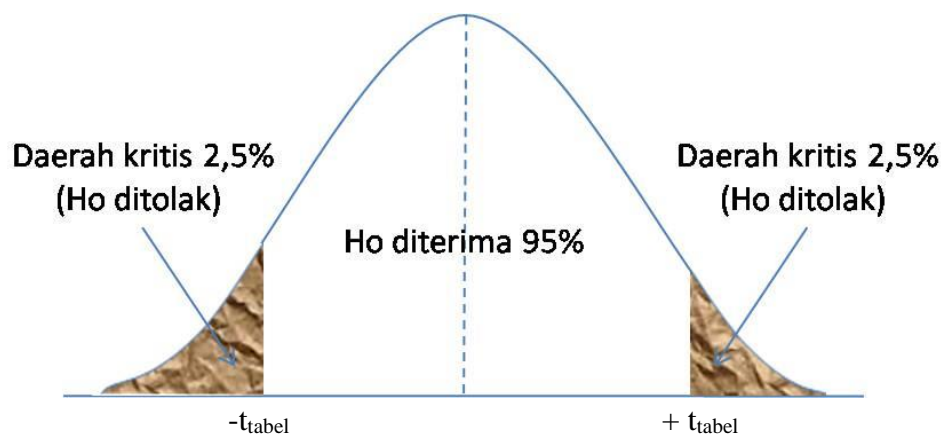
dibandingkan dengan $t_{tabel} = \pm t (\alpha/2, n-1)$.

3. Kriteria Uji:

Terima H_0 jika $- t_{tabel} < t_{hitung} < + t_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam distribusi kurva normal t

Gambar 3-1
Kriteria Pengujian Hipotesis



Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai sig < $\alpha = 5\%$

4. Kesimpulan:

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 .

3.8.2.2.2 Uji F Statistik atau Uji Simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui pada model I apakah variabel DAU, DAK, DID dan DD secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel IPM, serta untuk mengetahui pada model II apakah variabel BN dan IPM secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel PE.

Langkah-langkah pengujian:

1. Hipotesa:

- Model 1

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$ (DID, DAU, DAK, dan DD secara bersama-sama tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq 0$ (DID, DAU, DAK, dan DD secara bersama-sama berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

- Model 2

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ (IPM dan BN secara bersama-sama tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap PE)

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ (IPM dan BN secara bersama-sama berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap PE)

2. Uji Statistika F:

$$F = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(N-K)} \dots\dots\dots(3-5)$$

Dimana: K : jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta
 N : jumlah observasi

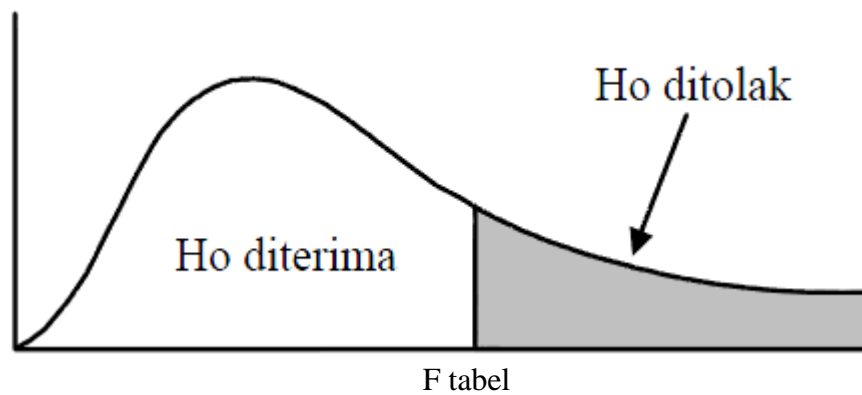
Dibanding dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n - K - 1)$

3. Kriteria Uji:

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam distribusi kurva F

Gambar 3-2
Kriteria Pengujian Hipotesis



Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai $sig < \alpha = 5\%$

4. Kesimpulan:

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 .

3.8.2.2.3 Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas).
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas), dan
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokoreasi).

a. Multikolinearitas

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada hubungan linier baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen (Gujarati, 2003). Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak dipercaya.

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing

variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *auxilliary regression* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R2 regresi persamaan utama lebih dari R2 regresi *auxilliary* maka didalam model tidak terjadi multikonearitas. *Model auxilliary regression* adalah:

$$F_t = \frac{R^2 .X1,X2,X3,...,Xk / (k-2)}{1-R^2 .X1,X2,X3,...,Xk / (N-K+1)} \dots\dots\dots(3-6)$$

b. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji F dapat menjadi tidak “*reliable*” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R² yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability *Observation R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heterokedasrisitas dalam model ditolak.

c. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson atau Durbin Watson Test. Dimana apabila d_i dan d_u adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada $2 < DW < 4-d_u$ maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Ariefianto, 2012).

3.8.2.2.4 Uji Hausman (Pemilihan Model Regresi Data Panel)

Uji yang digunakan untuk menentukan model regresi pada data panel yaitu *Fixed Effect* atau *Random Effect*, maka selanjutnya akan dilakukan uji signifikan antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect* untuk mengetahui model mana yang lebih tepat untuk digunakan, pengujian ini disebut dengan Uji Hausman.

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang akan digunakan. Pengujian Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H_0 : Random Effect Model

H_a : Fixed Effect Model

Uji Hausman akan mengikuti distribusi chi-squares sebagai berikut:

$$m = q' \text{Var}(q) - 1 q'$$

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect*, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka, model yang tepat adalah model *Random Effect*.

1. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Efek tetap disini dimaksudkan bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*).

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (dummy). Oleh karena itu, model ini sering disebut juga dengan *Least Squares Dummy Variables (LSDV)* (Winarno, 2015).

2. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Namun untuk menganalisis metode efek random ini ada satu syarat, yaitu objek data silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien (Ariefianto:2012).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga untuk melaksanakan tugas pemerintahannya diperlukannya bantuan untuk di masing-masing daerah di Indonesia. Di masa Orde Baru, Indonesia pernah menerapkan pola desentralisasi, namun dalam pelaksanaannya, desentralisasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Bahkan, dalam pelaksanaannya menggunakan pola sentralisasi. Dengan demikian, sejak 1 Januari 2001 Indonesia resmi mengimplementasikan pola otonomi daerah dari sisi kewenangan serta desentralisasi fiskal dari sisi keuangannya. Sehingga dengan diberlakukannya pola otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka tiap daerah memiliki kebebasan dalam mengelola politik, keuangan, serta kekayaan yang ada di daerah tersebut sehingga dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan tugasnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Walaupun demikian, pemerintah pusat tetap ikut campur dalam mengembangkan daerahnya, agar antar daerah yang ada di Indonesia tidak mengalami ketimpangan yang bisa disebabkan karena berbagai hal, misalnya: kekayaan alam yang berbeda-beda disetiap daerah, banyaknya penduduk yang tinggal di masing-masing daerah, dan berbagai faktor lainnya. Campur tangan pemerintah untuk membangun daerah terlihat dari kebijakan Transfer ke Daerah yang dibuat oleh pemerintah.

Transfer ke daerah yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa pemberian dana perimbangan, dana otonomi, dan dana khusus lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhan pada masing-masing daerahnya. Pengelolaan dana

transfer daerah tersebut harus dilaksanakan secara baik, efektif, dan efisien untuk meningkatkan pembangunan nasional. Salah satu indikator penilaian pembangunan nasional yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM juga dapat dijadikan sebagai indikator apakah pengeluaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah telah dilakukan untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia di seluruh daerah telah merata.

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

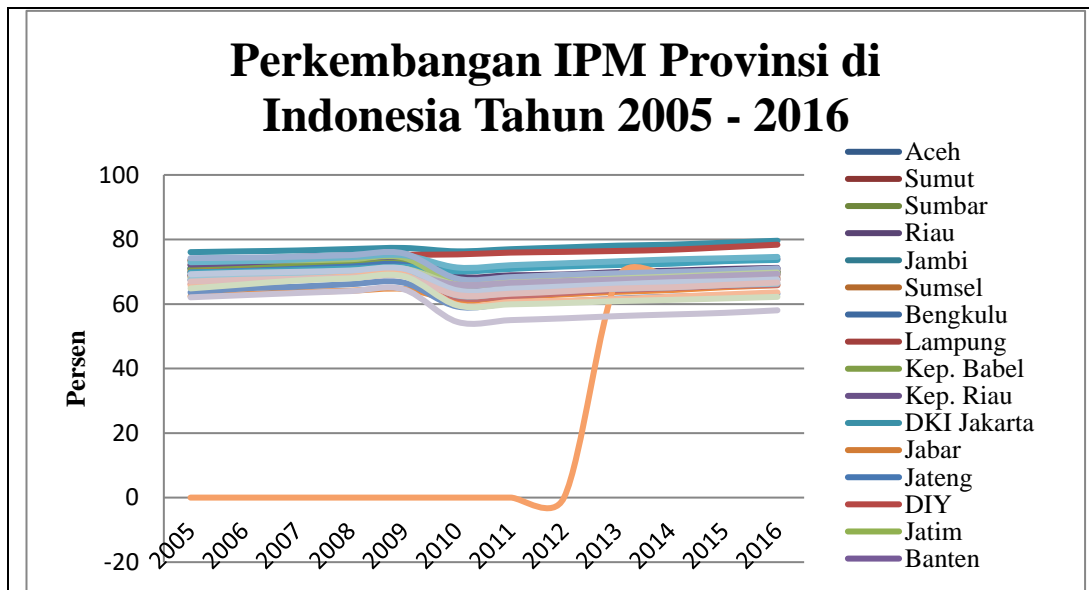
Indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan nasional berdasarkan laporan UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia melalui laporan-laporan tahunan UNDP yang berjudul *Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia)*. Inti dari seluruh laporan yang dimulai sejak tahun 1990 ini adalah pembuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index – HDI*). UNDP memeringkat IPM semua negara dengan skala 0 (pembangunan manusia terendah) sampai 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu: *masa hidup (longevity)* yang diukur melalui harapan hidup setelah lahir, *pengetahuan* yang diukur melalui bobot rata-rata tingkat melek aksara orang dewasa dan rasio partisipasi sekolah bruto, serta *standar hidup* yang diukur berdasarkan produk domestik bruto perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap negara yang nilainya berbeda-beda untuk mencerminkan biaya hidup. Perhitungan IPM mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali ditetapkan. Pada pertama kali penetapannya, perhitungan IPM menggunakan rumus yang relatif rumit untuk

mengubah tingkat pendapatan PPP menjadi tingkat pendapatan “yang disesuaikan”. Kemudian perhitungan IPM diubah untuk tingkat pendapatan yang disesuaikan dengan hanya menghitung nilai log dari pendapatan saat ini. Untuk mendapatkan indeks pendapatan hanya dengan mengurangi log 100 dari log pendapatan saat ini, dengan asumsi bahwa pendapatan riil perkapita tidak kurang dari \$100 PPP. Pada tahun 2010 UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia yang baru. Indeks ini masih berdasarkan standar hidup, pendidikan, dan kesehatan. Semua komponen IPM ini dihitung dengan cara yang sama hanya saja komponen IPM yang berbeda dari IPM sebelumnya.

Pertumbuhan IPM dari tahun 2005 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi, dimana IPM selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Selain itu juga fluktuasi IPM dalam penelitian ini juga dikarenakan penggunaan data IPM melalui dua metode, yaitu dari tahun 2005 hingga 2009 data IPM yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan IPM menggunakan metode lama, sedangkan dari tahun 2010 hingga 2016 data IPM yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan IPM menggunakan metode baru. Berikut merupakan grafik perkembangan IPM dari tahun 2005 hingga 2016 setiap provinsi di Indonesia.

Gambar 4-1

Perkembangan IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2005 – 2016



Sumber: BPS (www.bps.go.id) dan diolah

Dari gambar 4-1 menunjukkan bahwa tren Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Provinsi di Indonesia selalu mengalami fluktuasi dari tahun 2005 hingga 2016. Rata-rata pergerakan IPM untuk seluruh Provinsi hampir sama, yaitu bergerak pada angka 60an hingga 70an namun untuk daerah bagian Timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Maluku, serta Maluku Utara IPM hanya bergerak pada angka 50an hingga 60an hal ini dapat dilihat pada grafik Papua di tahun 2010 hingga 2016 IPM di Papua hanya pada rata-rata 56,18 dengan perhitungan IPM model baru. Dari grafik tersebut juga dapat kita lihat bahwasannya adanya penurunan nilai IPM di tahun 2009 ke 2010, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perhitungan IPM untuk tahun 2005 hingga 2009 dan 2010 hingga 2016. Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwasannya untuk tingkat pembangunan manusia di Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke sudah hampir merata. Hal ini membuktikan bahwasannya pembangunan

sudah sampai kepada daerah-daerah terpinggir di Indonesia. Fluktuasi IPM ini dapat disebabkan karena perbedaan sumber daya alam di setiap daerah, selain itu juga dikarenakan letak geografi serta struktur demografi setiap daerah yang berbeda-beda.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Human Development Report* UNDP bahwasannya Indonesia masuk kedalam *Medium Human Development* dengan ranking ke 113 dengan nilai IPM 0,689 pada tahun 2015 dari seluruh negara-negara di dunia. Disini Indonesia masih kalah dengan negara Malaysia yang dimana Malaysia pada ranking 59 dengan nilai IPM 0,789. Namun walaupun demikian, Indonesia masih diatas dari Vietnam, Philipine dan India yang membuktikan bahwasannya pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia masih berjalan dengan baik dan dapat ditingkatkan lagi menjadi lebih baik.

4.1.2 Perkembangan Variabel yang mempengaruhi IPM di Indonesia

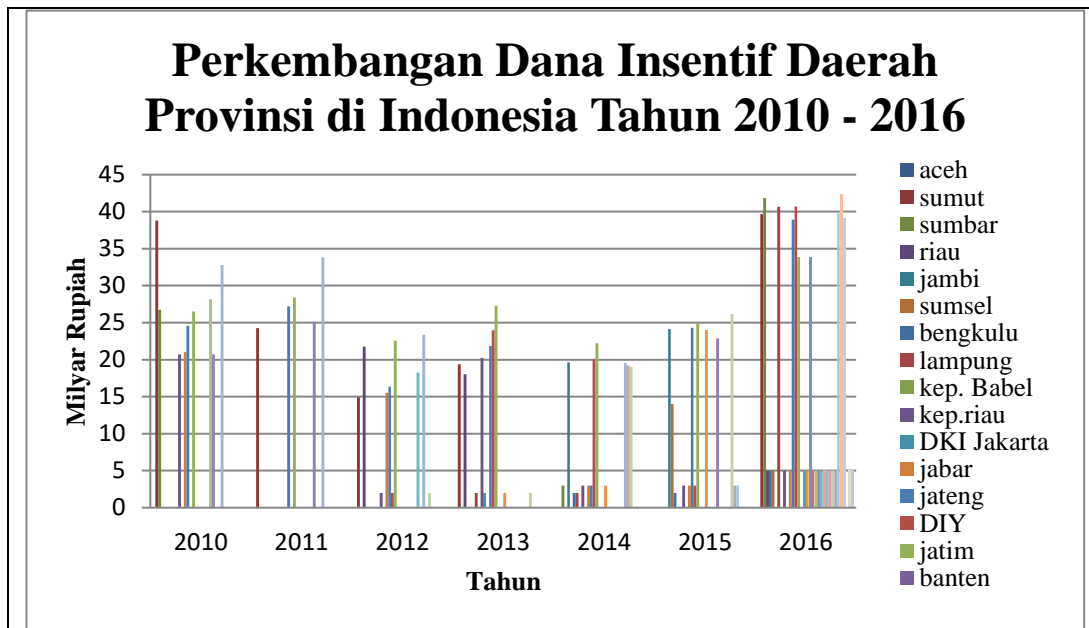
1) Perkembangan Dana Insentif Daerah

Transfer ke Daerah merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk membantu daerah-daerah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal ini dilakukan pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat besar antar daerah-daerah yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk transfer ke daerah yang diberikan oleh pemerintah ialah Dana Insentif Daerah, yang dimana dana ini tidak diberikan untuk semua daerah/provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan Dana Insentif Daerah ini digunakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang dialokasikan kepada daerah. Alokasi Dana Insentif Daerah ini bertujuan untuk mendorong agar daerah berupaya mengelola

keuangannya lebih baik. Berikut merupakan grafik perkembangan daerah-daerah yang memperoleh Dana Insentif Daerah.

Gambar 4-2

**Perkembangan Dana Insentif Daerah Provinsi di Indonesia
Tahun 2010 – 2016**



Sumber:Kementerian keuangan (www.kemenkeu.go.id) dan diolah

Dari gambar 4.2 terlihat bahwasannya dana insentif daerah yang dikeluarkan pemerintah tidak diberikan untuk semua daerah/provinsi yang ada di Indonesia, melainkan dalam setiap tahunnya hanya beberapa provinsi saja yang menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana insentif daerah. Seperti yang terlihat pada gambar diatas, pada tahun 2011 merupakan tahun dimana jumlah provinsi yang mendapatkan dana insentif daerah terendah yang dimana pada tahun ini hanya 5 provinsi saja yang mendapatkan dana insentif daerah ini. Walaupun demikian, bukan berarti beberapa provinsi lain tidak mendapatkan dana insentif dari pemerintah, hanya saja dana insentif daerah yang diberikan

pemerintah langsung kepada kabupaten/kota yang ada di beberapa provinsi di Indonesia.

Dari gambar 4.2 ini juga dapat kita lihat bahwasannya pada tahun-tahun terakhir (2014 hingga 2016) pemberian dana insentif daerah ini mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah ataupun dari sisi banyaknya provinsi/daerah yang mendapatkannya. Terkhusus di tahun 2016 dapat dilihat bahwasannya hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia mendapatkan dana insentif daerah ini. Hal ini terjadi didalam kepemimpinan Jokowi-JK yang dimana selaras dengan nawa cita Jokowi-JK yaitu untuk membangun dari desa serta daerah-daerah terpinggir. Yang dimana, untuk membangun atau untuk meningkatkan kualitas daerah-daerah pinggiran sangat memerlukan dana yang besar, terutama lagi jika daerah-daerah tersebut sangat jauh tertinggal baik dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, bahkan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang tidak memadai. Maka dari itu diperlukannya dana yang besar untuk membangun ketertinggalan suatu daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya dana insentif daerah ini dari tahun ke tahunnya selalu mengalami peningkatan.

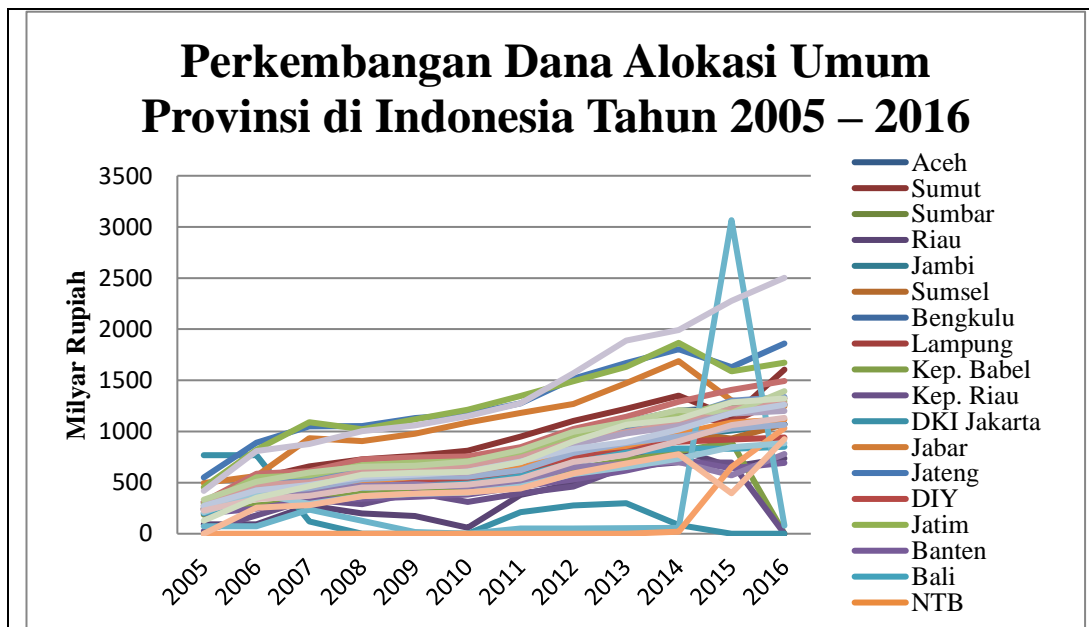
2) Perkembangan Dana Alokasi Umum

Transfer daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah selain dalam bentuk Dana Insentif Daerah, juga diberikan dalam bentuk dana perimbangan. Dalam dana perimbangan itu terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Tujuan adanya pengalokasian dan perimbangan ialah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga akan tercipta keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini dana perimbangan yang saya gunakan ialah Dana Alokasi Umum (DAU), dimana DAU ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan DAU ini secara nasional sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri yang diberikan terkhusus kepada daerah-daerah pemekaran. Oleh karena itu, besaran DAU yang dikeluarkan pemerintah pusat selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya untuk seluruh daerah-daerah di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari grafik perkembangan DAU provinsi di Indonesia berikut:

Gambar 4-3

Perkembangan Dana Alokasi Umum Provinsi di Indonesia Tahun 2005 – 2016



Sumber: Kementerian keuangan (www.kemenkeu.go.id) dan diolah

Dari gambar 4.3 diatas, dapat dilihat bahwasannya trend pengalokasian Dana Alokasi Umum untuk seluruh provinsi di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Seperti yang terlihat dari gambar tersebut bahwasannya pengalokasian DAU terbesar terjadi pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur yang dimana dana yang dikeluarkan pemerintah mencapai 3066,05 Milyar rupiah. Selain itu pengalokasian terbesar berikutnya di tahun 2016 di Provinsi Papua yaitu sebesar 2502,45 Milyar rupiah. Selain itu, untuk provinsi pemekaran yang baru seperti Kalimantan Utara juga diberikan DAU tiga tahun terakhir, yang dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup drastis atau signifikan yaitu di tahun 2014 dana DAU yang diberikan sebesar 20,57 Milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2015 DAU meningkat sangat banyak yaitu menjadi 651,25 Milyar rupiah serta meningkat cukup signifikan di tahun 2016 yaitu alokasi DAU yang diberikan menjadi 1032,46 Milyar rupiah.

Peningkatan alokasi DAU yang terlihat pada gambar tersebut sangat bagus untuk membantu keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang terjadi antar daerah yang satu dengan yang lainnya. Namun, tingginya alokasi DAU ini membuktikan bahwasannya tingkat kemandirian daerah di Indonesia ini sangat kecil karena sangat bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Seharusnya, DAU yang dialokasikan pemerintah pusat harus menurun setiap tahunnya karena pemerintah pusat mengharapkan daerah itu telah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya karena daerah telah diberikan kebebasan dalam hal keuangannya untuk memenuhi kebutuhannya.

3) Perkembangan Dana Alokasi Khusus

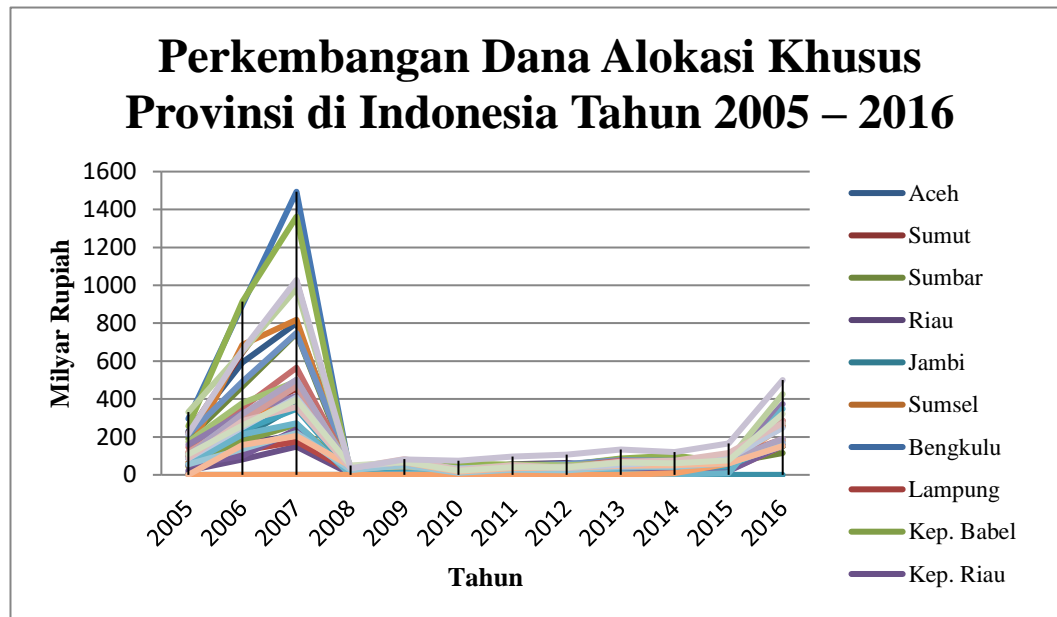
Selain Dana Alokasi Umum, komponen dana perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain dengan DAU yang diberikan untuk seluruh provinsi di Indonesia, DAK hanya diberikan untuk beberapa provinsi saja yang sudah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DAK diberikan oleh pemerintah untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, energi pedesaan, perumahan dan pemukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi pedesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Selain itu juga, DAK diberikan pemerintah untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan daerah untuk meningkatkan atau menyelaraskan kepentingan nasional. DAK juga dialokasikan kepada daerah tertinggal dalam rangka melanjutkan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur sanitasi, dan infrastruktur air minum.

Provinsi-provinsi/daerah-daerah yang mendapatkan DAK harusla sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yang dimana kriteria tersebut terdiri dari 3 komponen, yaitu: (1) kriteria umum, (2) kreiteria khusus, dan (3) kriteria teknis. Yang dimana kriteria umum dilihat dari kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD

setelah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan kriteria khusus dilihat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah seperti aturan perundang-undangan untuk daerah yang termasuk kedalam pengaturan otonomi khusus atau termasuk dalam 199 kabupaten tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK. Selain daerah tertinggal, daerah yang diprioritaskan mendapatkan DAK ialah daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, daerah pariwisata. Kriteria khusus ini dilihat dari indeks kewilayahan oleh menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Lembaga terkait. Sedangkan untuk kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah terkait dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintah, kelautan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, serta sarana dan prasarana pedesaan, dan perdagangan.

Gambar 4-4

Perkembangan Dana Alokasi Khusus Provinsi di Indonesia
Tahun 2005 – 2016



Sumber: Kementerian keuangan (www.kemenkeu.go.id) dan diolah

Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwasannya alokasi DAK tertinggi terjadi pada tahun 2007, yang dimana pengalokasian terbesar diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 1493,68 Milyar rupiah, kemudian sebesar 1362,15 Milyar rupiah diberikan kepada Provinsi Jawa Timur, serta sebesar 1028,07 Milyar rupiah diberikan kepada pemerintahan di Provinsi Papua yang dimana dana-dana ini dialokasikan untuk membantu provinsi membiayai kebutuhan khususnya. Seperti di Papua, dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya seperti meningkatkan kualitas pendidikan dengan menambah jumlah sekolah dan juga meningkatkan kualitas guru yang mengajar. Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat disana dengan menambah jumlah fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan lainnya serta melengkapi berbagai jenis obat-obatan serta memperbaiki gizi anak-anak, dan melengkapi faksin untuk

anak-anak baru lahir hingga umur 1 tahun sehingga akan meingkatkan daya tahan tubuh.

Selain itu juga DAK digunakan untuk membangun fasilitas infrastruktur bukan hanya infrastruktur jalan, irigasi, bahkan sampai kepada penyaluran air bersih dan air minum karena pada tahun 2007 ini Indonesia bagian timur sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih sehingga mereka harus mengeluarkan uang yang cukup besar bahkan harus rela berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. Kemudian dapat dilihat ditahun 2008 hingga 2014 DAK yang dialokasikan jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2007. Yang kemudian ditahun pemerintahan JKW-JK yaitu tahun 2015 hingga 2016 pengalokasian DAK kembali meningkat walaupun tidak sebanyak di tahun 2007 hal ini dikarenakan program pemerintahan JKW-JK yaitu memperbaiki infrastruktur secara merata dari Sabang hingga Merauke untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan mengecilkan tingkat kesenjangan antar daerah serta antar masyarakat Indonesia.

4) Perkembangan Dana Desa

Istilah Dana Desa baru dikenal sejak pemerintahan Jokowi-JK dalam program kerja Anggaran Dana Desa (ADD). Namun, sejak kepemimpinan SBY-JK serta SBY-Boediono, dana desa juga telah diadakan hanya saja tidak semarak di kepemimpinan Jokowi-JK. Hal ini dikarenakan pada kepemimpinan Jokowi-JK ini pembangunan desa dan daerah tertinggal sangat dicanangkan besar-besaran untuk meratakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga pengalokasian Dana Desa ini selalu meningkat setiap tahunnya baik dari

kepemimpinan SBY hingga kepemimpinan Jokowi. Hal ini disebabkan karena membangun dari desa bahkan daerah tertinggal sangat memerlukan banyak dana yang dikeluarkan.

Dana Desa yang dialokasikan kepada desa, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh desa-desa yang ada di Indonesia. Pemanfaatan Dana Desa ini dapat berupa peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa, meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta pembuatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sehingga manfaatnya dapat dirasakan bukan hanya dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Gambar 4-5

**Perkembangan Dana Desa Provinsi di Indonesia
Tahun 2005 – 2016**



Sumber: Kementerian keuangan (www.kemenkeu.go.id) dan diolah

Dari 4.5 diatas, terlihat jelas bahwasannya anggaran dana desa yang dikeluarkan pada masa pemerintahan SBY sangat besar untuk seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebesar lebih dari 2000 milyar rupiah ditahun 2005 dan mencapai angka tertinggi yaitu mancapai 9000 milyar rupiah di tahun 2014. Namun ketika masuk pada pemerintahan Jokowi anggaran dana desa turun drastis hampir diseluruh provinsi di Indonesia. Walaupun pada masa pemerintahan Jokowi anggaran dana desa menurun tetap saja trend di tahun-tahun berikutnya selalu meningkat hingga mencapai 5000 milyar rupiah. Tidak semua provinsi di Indonesia mendapatkan dana desa, misalnya DKI Jakarta, dari tahun 2005 hingga 2016 provinsi ini tidak pernah mendapatkan anggaran dana desa. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan bahkan pusat perekonomian di Indonesia, sehingga seluruh kebutuhan fisik seperti infrastruktur, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya di provinsi ini telah terpenuhi. Selain itu, terlihat jelas untuk Provinsi Kalimantan Utara, ditahun 2005 hingga 2013 provinsi ini belum mendapatkan anggaran dana desa dikarenakan Provinsi Kalimantan Utara ini baru terbentuk di tahun 2013, sehingga di tahun 2014 sebagai provinsi baru ia membutuhkan banyak dana untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, maka dari itu di tahun 2014 Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan anggaran dana desa sebesar 9037,94 Milyar rupiah untuk memenuhi kebutuhan seluruh desa di provinsinya.

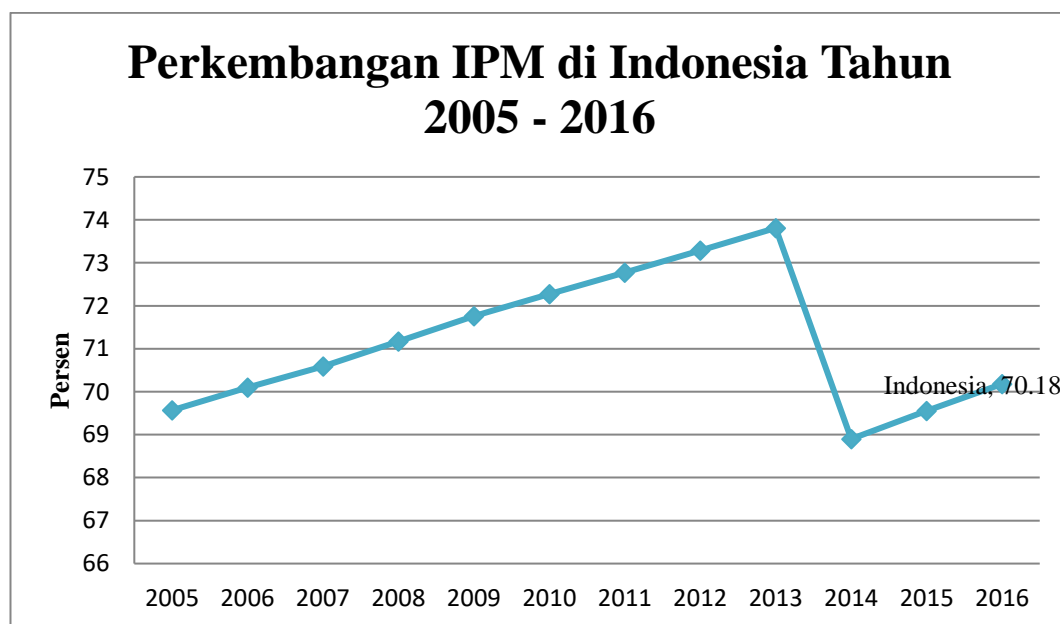
4.1.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi meskipun masih banyak indikator-

indikator lain yang mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi apabila Indeks Pembangunan Manusia dalam kondisi yang baik maka akan berefek positif bagi pertumbuhan ekonomi dan begitu juga sebaliknya, apabila nilai Indeks Pembangunan Manusia dalam kondisi tidak baik maka pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dikatakan tidak baik, karena belanja negara akan banyak dikeluarkan untuk membantu setiap provinsi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Selain Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Negara juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena dalam belanja negara terdapat anggaran-anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dibidang pendidikannya, kesehatan, bahkan sampai dengan kesejahteraan sumber daya manusia itu yang diukur dari pendapatan per kapitanya.

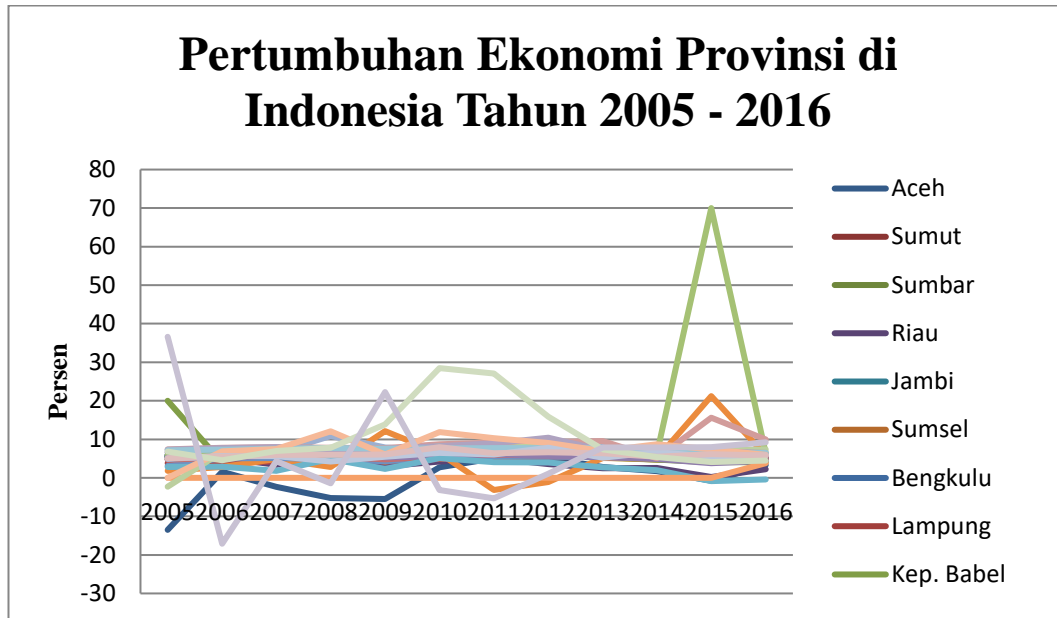
Gambar 4-6

Perkembangan IPM di Indonesia Tahun 2005 – 2016



Sumber: BPS (www.bps.go.id) dan diolah

Gambar 4-7
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia
Tahun 2005 – 2016



Sumber: Bappenas (www.bappenas.go.id) dan diolah

Dari gambar 4-6 dan 4-7 menjelaskan bahwasannya perkembangan IPM di Indonesia berfluktuatif lebih tenang, begitu juga dengan perkembangan IPM per-provinsi di Indonesia (gambar 4-1) yang terlihat lebih tenang pergerakannya. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Indonesia banyak yang berfluktuatif lebih ekstrim seperti halnya pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Kalimantan tengah yang dimana pertumbuhan ekonominya di tahun 2014 hanya sebesar 6,2% kemudian di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah meningkat secara signifikan hingga mencapai angka 70% setelah itu turun secara signifikan pada tahun 2016 menjadi 6,4%. Selain Kalimantan Tengah, hal sama dialami pada Provinsi Papua yang dimana di tahun 2005 pertumbuhan ekonominya berada pada 36,6% kemudian di tahun 2006 pertumbuhan ekonominya Papua turun secara signifikan mencapai angka -17,1%.

4.1.4 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat frekuensi data independen dan dependen variabel data, serta sebaran data pada tingkat maksimum dan minimum dari data. Adapun hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4-1
Statistik Deskriptif Model IPM

	IPM	DID	DAU	DAK	DD
Mean	67.27184	3.562574	699.9486	126.3828	4534.999
Median	68.64500	0.000000	642.3650	53.80500	4569.110
Maximum	79.60000	42.40000	3066.050	1493.680	9037.940
Minimum	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	10.38229	9.010446	434.7828	193.8054	2733.182
Skewness	-5.307136	2.695529	0.998216	3.346711	-0.080479
Kurtosis	34.83090	9.359582	5.483741	17.10000	2.042152
Jarque-Bera	19139.78	1181.632	172.6300	4141.401	16.03746
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000329
Sum	27446.91	1453.530	285579.0	51564.17	1850280.
Sum Sq. Dev.	43871.35	33043.57	76937700	15287133	3.04E+09
Observations	408	408	408	408	408

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Dari hasil statistik deskriptif diatas, menunjukkan bahwasannya dalam rentang tahun 2005-2016, nilai mean dari IPM Provinsi di Indonesia sebesar 67.27 artinya bahwa dalam pertahun Indeks Pembangunan Manusia bernilai 67.27 persen, sementara nilai mean dari variabel DID (Dana Insentif Daerah) sebesar 3.56 ini berarti bahwa dalam kurun waktu 12 tahun Dana Insentif Daerah yang di berikan kepada Provinsi di Indonesia sekitar 3.56 Milyar rupiah, sementara rata-rata variabel DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar 699.95 artinya dalam kurun waktu 12 tahun nilai DAU setiap provinsi di Indonesia rata-rata 699.95 Milyar rupiah per tahun.

Adapun rata-rata variabel DAK (Dana Alokasi Khusus) bernilai 126.38, hal ini menunjukkan bahwasanya pengalokasian DAK yang diberikan pemerintah kepada daerah/provinsi sebesar 126,38 Milyar setiap tahunnya. Sedangkan nilai mean pada variabel DD (Dana Desa) 4534.99, yang artinya anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa di seluruh provinsi di Indonesia sebesar 4534,99 Milyar selama jangka waktu 12 tahun.

Tabel 4-2

Statistik Deskriptif Model Pertumbuhan Ekonomi

	PE	IPM
Mean	5.894853	67.27184
Median	5.830000	68.64500
Maximum	70.00000	79.60000
Minimum	-17.10000	0.000000
Std. Dev.	4.987361	10.38229
Skewness	5.880367	-5.307136
Kurtosis	75.46100	34.83090
Jarque-Bera	91611.49	19139.78
Probability	0.000000	0.000000
Sum	2405.100	27446.91
Sum Sq. Dev.	10123.62	43871.35
Observations	408	408

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Dari hasil statistik deskriptif diatas, menunjukkan bahwasannya sepanjang tahun 2005-2016, nilai mean dari variabel PE (Pertumbuhan Ekonomi) 5.89 artinya pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Indonesia senilai 5,89% setiap pertahunnya. Nilai mean dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 67.27, hal ini berarti pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Indonesia sebesar 67.27% per tahunnya.

4.2 Hasil Analisis Regresi

Tabel 4-3

Regresi Berganda Model IPM

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 03/15/18 Time: 12:35
Sample: 2005 2016
Periods included: 12
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 408

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.90178	1.269892	50.32064	0.0000
DID	0.053497	0.060999	0.877010	0.3810
DAU	0.000539	0.001294	0.416532	0.6772
DAK	0.006214	0.002701	2.300595	0.0219
DD	0.000445	0.000196	2.271496	0.0236
R-squared	0.026096	Mean dependent var	67.27184	
Adjusted R-squared	0.016429	S.D. dependent var	10.38229	
S.E. of regression	10.29665	Akaike info criterion	7.513694	
Sum squared resid	42726.50	Schwarz criterion	7.562852	
Log likelihood	-1527.794	Hannan-Quinn criter.	7.533146	
F-statistic	2.699582	Durbin-Watson stat	0.317026	
Prob(F-statistic)	0.030373			

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Dari hasil regresi pertama diatas, ditemukan masalah autokorelasi dan variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sehingga diduga dengan perlu dilakukannya logaritma natural dalam model ini. Transformasi logaritma natural biasanya digunakan pada situasi dimana terdapat hubungan tidak linier antara variabel penjelas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Transformasi logaritma akan membuat hubungan yang tidak linier dapat digunakan dalam model linier. Berikut adalah Logaritma natural pada model ini:

Tabel 4-4**Logaritma Natural Model IPM**

Dependent Variable: LOGIPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/26/18 Time: 20:39
 Sample (adjusted): 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 29
 Total panel (unbalanced) observations: 83

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.516179	0.074540	60.58727	0.0000
LOGDID	-0.003077	0.004943	-0.622444	0.5355
LOGDAU	-0.025027	0.009780	-2.559004	0.0124
LOGDAK	-0.010253	0.007089	-1.446268	0.1521
LOGDD	-0.008195	0.004638	-1.766716	0.0812
R-squared	0.163345	Mean dependent var		4.227550
Adjusted R-squared	0.120439	S.D. dependent var		0.049268
S.E. of regression	0.046206	Akaike info criterion		-3.253079
Sum squared resid	0.166527	Schwarz criterion		-3.107365
Log likelihood	140.0028	Hannan-Quinn criter.		-3.194539
F-statistic	3.807091	Durbin-Watson stat		0.206833
Prob(F-statistic)	0.007028			

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Dari hasil uji logaritma natural diatas, dapat dilihat bahwasannya pada model ini terkena multikolinearitas untuk semua variabel bebas. Kemudian, dapat juga dilihat bahwasannya variabel DID pada model ini juga tidak signifikan pada derajat α 5%, α 10%, maupun α 15%. Sehingga diduga lag variabel terikat (variabel terikat pada tahun sebelumnya IPM_{t-1}) menjadi variabel bebas dan mempengaruhi variabel terikat pada tahun sekarang. Maka variabel bebas baru dalam model yaitu IPM_{t-1} ditambahkan. Untuk menentukan nilai IPM_{t-1} maka dilakukan uji *autiregressive* sebagai berikut:

Tabel 4-5***Autoregressive Model of IPM***

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/20/18 Time: 12:21
 Sample (adjusted): 2006 2016
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 374
 Convergence achieved after 3 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.54708	1.660283	41.28639	0.0000
AR(1)	0.880121	0.018360	47.93787	0.0000
R-squared	0.860676	Mean dependent var		67.27366
Adjusted R-squared	0.860302	S.D. dependent var		10.20616
S.E. of regression	3.814681	Akaike info criterion		5.520924
Sum squared resid	5413.265	Schwarz criterion		5.541910
Log likelihood	-1030.413	Hannan-Quinn criter.		5.529256
F-statistic	2298.039	Durbin-Watson stat		2.198678
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.88			

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Dari hasil uji *autoregressive*, maka didapat hasil bahwasanya variabel terikat pada tahun sebelumnya (IPM_{t-1}) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel terikat pada tahun t (IPM_t). Sehingga didalam model akan ditambahkan lag variabel terikat atau variabel terikat pada tahun sebelumnya sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

Selanjutnya akan dilakukan uji regresi untuk model kedua yaitu model Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, adapun hasil regresi yang diperoleh ialah sebagai berikut:

Tabel 4-6

Regresi Berganda Model Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: PE
Method: Panel Two-Stage Least Squares
Date: 03/19/18 Time: 20:41
Sample: 2005 2016
Periods included: 12
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 408
Instrument specification: C DID DAU DAK DD
Constant added to instrument list

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.235570	9.910385	0.528291	0.5976
IPM	0.009800	0.147273	0.066545	0.9470
R-squared	0.004172	Mean dependent var		5.894853
Adjusted R-squared	0.001720	S.D. dependent var		4.987361
S.E. of regression	4.983071	Sum squared resid		10081.38
F-statistic	0.004410	Durbin-Watson stat		1.671935
Prob(F-statistic)	0.947087	Second-Stage SSR		10123.51
Instrument rank	5	Prob(J-statistic)		0.111667

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Dari hasil regres model kedua Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi maka diperoleh hasil bahwa variabel IPM secara parsial berpengaruh secara signifikan. Metode 2sls adalah teknik yang dilakukan dalam melakukan regresi pada model ini, dimana IPM yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa (DD). Disini juga terlihat bahwasanya dalam model kedua ini terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga lag variabel tidak perlu dilakukan di model ini.

4.2.1 Penaksiran

1) Koefisien Determinasi (D)

Koefisien determinasi (*R Square*) berarti proporsi persentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel

bebas (independen) secara bersama-sama. Berdasarkan dari model estimasi pertama yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi IPM Provinsi se-Indonesia setelah dilakukan *autoregressive* dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah sebesar 86,06%, artinya secara bersama-sama variabel DID, DAU, DAK, DD< dan IPM_{t-1} memberika variasi penjelasan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan nilai 13,94% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.

Sedangkan dari model estimasi yang kedua yaitu variabel IPM dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi se-Indonesia dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0.004172, artinya variabel bebas IPM hanya mampu menjelaskan 0,41% terhadap variabel terikat. Nilai 99,59% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model estimasi atau berada dalam *disturbance error term*.

2) Korelasi (R)

Dari hasil regres pada model pertama dan model *autoregressive* untuk model pertama (variabel-variabel yang mempengaruhi IPM provinsi se-Indonesia) diperoleh nilai R sebesar 0.92754663 atau 92.75%, artinya variabel bebas DID (dana insentif daerah), DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), DD (dana desa), dan IPM_{t-1} (IPM tahun sebelumnya) dapat menjelaskan variabel terikat (IPM) secara signifikan.

Hasil regres pada model kedua (IPM terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi se-Indonesia) diperoleh nilai R sebesar 0.41472883 atau 41.47%,

bahwasanya variabel IPM mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Suatu variabel bebas dikatakan memiliki kekuatan hubungan yang positif terhadap variabel terikat apabila memiliki nilai koefisien bertanda positif dan bernilai diatas 0.05 ($\alpha = 5\%$) dan dikatakan signifikan apabila nilai *probability* dari variabel bebas tersebut lebih kecil dari 0.05 atau tingkat kesalahan $\alpha 5\%$.

4.2.2 Interpretasi Hasil

Dari data pertama yang telah diperoleh maka persamaan regresi berikut dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan hasil *autoregressive* model pertama sebagai berikut:

$$IPM_{rt} = 63.90178 + 0.053497 DID_{rt} + 0.000539 DAU_{rt} + 0.006214 DAK_{rt} + 0.000445 DD_{rt} + 0.880121 IPM_{t-1} + \mu_{rt}$$

Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat dibuat sebuah interpretasi model atau hipotesa yang diambil melalui regres ini, yaitu:

- a. Bahwa variabel DID (dana insentif daerah) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sebab nilai koefisien variabel DID lebih besar ($>$) dari $\alpha 5\%$ yaitu 0.053497. Artinya, apabila nilai DID (Milyar rupiah) dinaikkan sebesar 1 Milyar rupiah, maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.053497% (*ceteris paribus*).
- b. Bahwa variabel DAU (dana alokasi umum) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sebab nilai koefisien variabel DAU

- bernilai positif yaitu 0.000539. Artinya, apabila nilai DAU (Milyar rupiah) dinaikkan sebesar 1 Milyar rupiah, maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.000539% (*ceteris paribus*).
- c. Bahwa variabel DAK (dana alokasi khusus) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sebab nilai koefisien variabel DAK bernilai positif yaitu 0.006214. Artinya, apabila nilai DAK (Milyar rupiah) dinaikkan sebesar 1 Milyar rupiah, maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.006214% (*ceteris paribus*).
- d. Bahwa variabel DD (dana desa) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sebab nilai koefisien variabel DD bernilai positif yaitu 0.000445. Artinya, apabila nilai DD (Milyar rupiah) dinaikkan sebesar 1 Milyar rupiah, maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.000445% (*ceteris paribus*).
- e. Bahwa variabel IPM_{t-1} (IPM pada tahun sebelumnya) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sebab nilai koefisien variabel IPM_{t-1} lebih besar ($>$) dari α 5% yaitu 0.880121. Artinya, apabila nilai IPM_{t-1} (persen) dinaikkan sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.880121% (*ceteris paribus*).

Dari data kedua yang telah diperoleh maka persamaan regresi berikut dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan hasil regresi model kedua sebagai berikut:

$$PE_{rt} = 5.235570 + 0.009800 IPM_{rt} + \sigma_{rt}$$

Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat dibuat sebuah interpretasi model atau hipotesa yang diambil melalui hasil regresi ini yaitu:

- a. Bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab nilai koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia (persen) bernilai positif yaitu 0.009800. Artinya, apabila nilai Indeks Pembangunan Manusia dinaikkan sebesar 1% maka akan menambah tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 0.009800% (*ceteris paribus*).

4.2.3 Konstanta dan Intersep

Didalam hasil estimasi data dalam model regresi variabel-variabel yang mempengaruhi IPM provinsi se-Indonesia, terdapat nilai konstanta sebesar 63.90178 yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia berkecenderungan naik ketika variabel penjelas tetap. Untuk interpretasi hasil regresi variabel independen, akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Dana Insentif Daerah (DID)

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel DID adalah 0.053497 dimana variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = 0.87$ dan nilai *probability* sebesar 0.3810 (diatas α 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan DID dengan Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia adalah positif dan tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai DID naik sebesar 1 Milyar rupiah maka Indeks

Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 0.53497 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel DID terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis di tolak.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel DAU adalah 0.000539 dimana variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = 0,41$ dan nilai *probability* 0.6772 (diatas α 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan DAU dengan Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia adalah positif dan tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai DAU naik sebesar 1 Milyar rupiah maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 0.000539 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel DAU terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis di tolak.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel DAK adalah 0.006214 dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = 2.3$ dan nilai *probability* 0.0219 (dibawah α 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan DAK dengan Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai DAU naik sebesar 1 Milyar rupiah maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 0.006214 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena

itu, variabel DAU terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis di terima

4) Dana Desa (DD)

Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel DD adalah 0.000445 dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = 2.27$ dan nilai *probability* 0.0236 (dibawah α 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan DD dengan Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai DD naik sebesar 1 Milyar rupiah maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 0.000445 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel DD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis di terima.

5) IPM_{t-1}

Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel IPM_{t-1} adalah 0.880121 dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = 47.93$ dan nilai *probability* 0.000 (dibawah α 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan IPM_{t-1} dengan Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai IPM_{t-1} naik sebesar 1 Milyar rupiah maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 0.880121 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena

itu, variabel DAU terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis di terima.

Di dalam hasil estimasi data dalam model regresi Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi se-Indonesia, terdapat nilai konstanta sebesar 68.54708 yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi se-Indonesia berkecenderungan naik ketika variabel penjelas tetap. Untuk interpretasi hasil regresi variabel independen, akan dijelaskan sebagai berikut:

6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel IPM adalah 0.009800 dimana variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi se-Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = 0.066545$ dan nilai *probability* 0.9470 (diatas α 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan IPM dengan pertumbuhan ekonomi provinsi se-Indonesia adalah positif dan tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai IPM naik sebesar 1 persen maka pembangunan ekonomi akan meningkat sebesar 0.066545 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel IPM terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis di tolak.

4.2.4 Uji Statistik

1) Pengujian Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji-f statistik bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil

regresi dengan menggunakan *autoregressive* pada model pertama, variabel DID (dana insentif daerah), DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), DD (dana desa), dan IPM_{t-1} (IPM tahun sebelumnya) terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Indonesia, maka nilai F_{tabel} sebesar 0.000000 (dibawah α 5%), sedangkan nilai F_{hitung} adalah sebesar 2.69. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t)

Uji-t statistik dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Regresi pengaruh variabel DID, DAU, DAK, DD, IPM_{t-1} pada model pertama dengan uji *autoregressive* terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi se-Indonesia, sedangkan untuk regresi pada model kedua, variabel IPM terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi se-Indonesia. Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai t_{tabel} yaitu:

Model pertama: $df (n)-k = 408 - 5 = 403$, $\alpha = 5\%$ maka nilai t_{tabel} sebesar 1,97

Model kedua: $df (n)-k = 408 - 1 = 407$, $\alpha = 5\%$ maka nilai t_{tabel} sebesar 1,97

4.2.5 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang pertama ataupun yang kedua ditemukan terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari

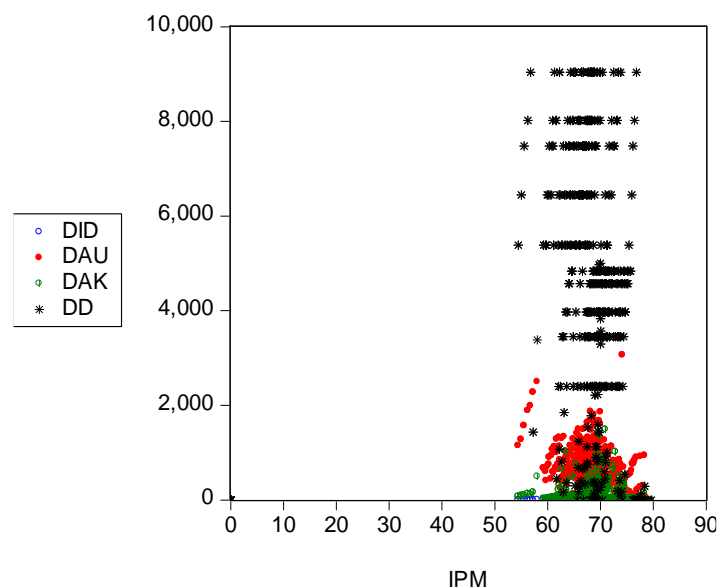
multikolinearitas, dan dapat dilihat dari hasil analisa model pertama dan kedua tidak ada ditemukan multikolinearitas, karena tidak ada tanda koefisien yang berubah (sesuai dengan hipotesa). Ada beberapa variabel dependen yang tidak signifikan terhadap variabel terikat dalam uji parsial.

2) Uji Heterokedastisidas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut tidak terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari heterokedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Dasar analisis heterokedastisitas sebagai berikut:

Gambar 4-8

Scatterplot Model IPM

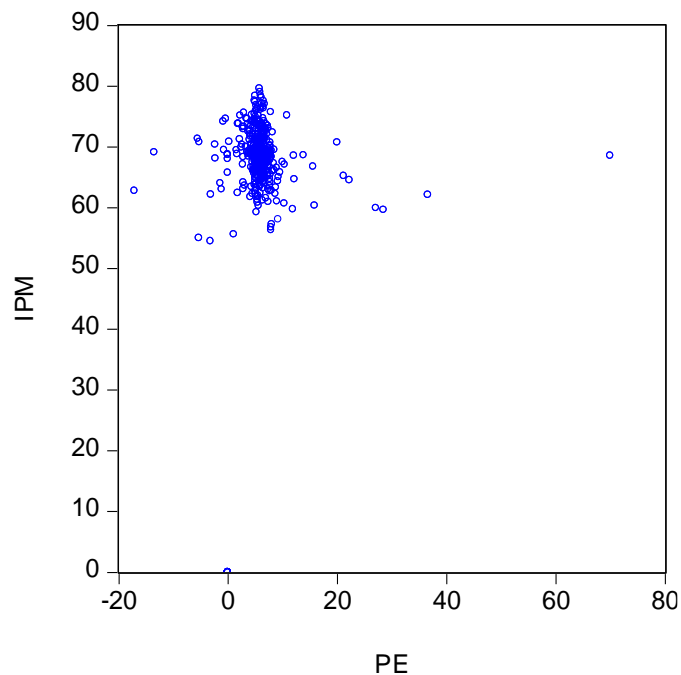


Sumber: E-Views 8 dan diolah

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara berkelompok, membentuk pola garis lurus walaupun tidak sejajar serta tersebar ke atas, samping, dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas pada model pertama.

Gambar 4-9

Scatterplot Model Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: E-Views 8 dan diolah

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara berkelompok, membentuk pola garis lurus walaupun tidak sejajar serta tersebar ke atas, samping dan bawah. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas pada model kedua.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji statistik *Durbin Watson* yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

Pada model pertama setelah dilakukan uji *autoregressive* diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 2.198678 artinya pada model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Sedangkan pada model kedua diperoleh nilai D-W sebesar 1.671935 artinya pada model kedua menunjukkan bahwa model yang digunakan juga sudah terbebas dari masalah autokorelasi sehingga model bisa diestimasi melalui variabel bebas yang digambarkan melalui variabel IPM. Dimana standar suatu model dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai D-W yang diperoleh $1,54 < D-W < 2,46$.

4) Uji Hausman

Tabel 4-7

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	59.083599	4	0.0000

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Dari hasil di atas, maka didapat nilai *time-series random* sebesar 0.0000, nilai *probability* < 0.05 maka model yang dipilih adalah *fixed effect*, disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan model *random effect*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil regres/estimasi model pertama yaitu pengaruh DID, DAU, DAK, dan DD sebesar 92,75% sedangkan sisanya 7,25% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model estimasi, atau berada dalam *disturbance error term*.
2. Hasil regres/estimasi model kedua yaitu pengaruh IPM sebesar 41,47% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model estimasi atau berada dalam *disturbance error term*.
3. Secara bersama-sama variabel DID, DAU, DAK, serta DD berpengaruh besar dalam pembentukan nilai IPM.
4. Secara parsial, variabel DID berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembentukan IPM. Variabel DAU berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembentukan IPM. Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM. Serta variabel DD berpengaruh positif dan signifikan dalam pembentukan IPM. Sedangkan variabel IPM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dalam pembentukan nilai pertumbuhan ekonomi.
5. Besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk transfer daerah yang semakin meningkat, juga diikuti dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia. Maka dapat dikatakan baik dalam

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono maupun dalam pemerintahan Joko Widodo pembangunan nasional sudah dijalankan dengan baik meskipun pada masa pemerintahan SBY belum terjadi pemerataan dalam pembangunan nasional. Untuk itu, di pemerintahan Jokowi ini beliau menekankan pada pembangunan yang dimulai dari daerah atau desa. Sehingga pembangunan nasional dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia secara merata.

5.2 Saran

1. Indeks Pembangunan Manusia meskipun tidak satu-satunya variabel ataupun sektor yang mendukung pembangunan nasional, tetapi apabila Indeks Pembangunan Manusia berada dalam keadaan tingkat yang tinggi maka akan memberikan dampak yang positif juga pada pembangunan nasional. Pemerintah harus mengambil kebijakan melalui mekanisme transfer daerah yang tepat guna sehingga tingkat produktivitas masyarakat akan meningkat pula.
2. Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa berpengaruh besar terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indikator penting dalam melihat pembangunan nasional di suatu negara. Maka dari itu diperlukan pengalokasian dan pengimplementasian mekanisme transfer daerah tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya dan pemberian dan transfer daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah.
3. Indeks Pembangunan Manusia juga bukan satu-satunya variabel yang mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan Indeks Pembangunan

Manusia yang besar menunjukkan bahwasanya tingkat kualitas sumber daya masyarakat yang besar pula. Sehingga dengan tingkat kualitas masyarakat yang besar maka secara langsung ataupun tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi. sehingga diperlukannya kebijakan agar kualitas sumber daya manusia di Indonesai meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan E-Views*. Jakarta:Erlangga
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta:BPFE
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta:BPFE
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Ketiga Jilid 1*. Jakarta:Erlangga
- Hermawan, Dudi. 2007. *Analisis Pelaksana Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Study Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten)*. Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Daerah*. Jakarta:PT Rajawali Pers.
- Kuncoro, Prof. Mudrajad Ph.D. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta:Erlangga
- Nachrowi, Nachrowi Djalal dan Hardius Usman. 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Nazara, Suahasil. 1994. *Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia, dalam Prisma*. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta:PT Raja Grafindo Perkasa
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta:Erlangga

B. Jurnal

- Azwardi dan Abukosim. 2007. *Pengelolaan Keuangan Pedesaan dalam mendorong Pembangunan Wilayah Pedesaan: Suatu Tinjauan Teoritis*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 5 Nomor 2.
- Badan Pusat Statistik. *Angka Kematian Bayi Provinsi di Indonesia*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 20 Desember 2017
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Gini Ratio*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 20 Desember 2017
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 20 Desember 2017
- Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Bruto Per Capita Indonesia*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 20 Desember 2017
- Bank Indonesia. 2013. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional, Laporan Nusantara, Vol. 8 No.3*. www.bi.go.id
- Egawa, Akio. 2013. *Will Income Inequality Cause a Middle Income Trap in Asia*. Jepang: Bruegel Working Paper
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*, Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145/PMK.07/13 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Umum dan Alokasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2014.
- Pratowo, Nur Isa. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal Study Ekonomi Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah

Provincial Governance Strengthening Programme. 2012. Panduan Penyusunan
Laporan pembangunan Manusia Tingkat Provinsi (LPMP). PGSP Project
Management Unit:Jakarta Pusat



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pada hari ini *Rabu* tanggal 21 Februari 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan EKONOMI PEMBANGUNAN menerangkan bahwa :

N a m a : RIZKY ANANDA
N .P.M. : 1405180059
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 15 Mei 1996
Alamat Rumah : Denai Gg.Abd Kadir
JudulProposal : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (CASE STUDY : KEPEMIMPINAN SBY DAN JKW)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I
Bab II	Hipotesis disesuaikan dgn Bab I
Bab III	Simpulan Modifikasi
Lainnya
Keputusan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Rabu 21 Februari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE.,M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan *EKONOMI PEMBANGUNAN* yang diselenggarakan pada hari *Rabu* tanggal *21 Februari 2018* menerangkan bahwa:

Nama : RIZKY ANANDA
N.P.M. : 1405180059
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 15 Mei 1996
Alamat Rumah : Denai Gg.Abd Kadir
JudulProposal : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (CASE STUDY : KEPEMIMPINAN SBY DAN JKW)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE.,M.Si.*

Medan,Rabu 21 Februari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE.,M.Si.

Pemanding

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

01/03-2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RIZKY ANANDA
N.P.M : 1405180059
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (CASE STUDY:
KEPEMIMPINAN SBY DAN JOKOWI)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
9/1-18	Bab I, Latar Belakang masalah Uraian pokok & Straight forward menyebut pd tujuan		
15/1-18	Penerapan Identifikasi masalah Fokus: Batasan dan Pungutan masalah & Urutan dgn tujuan dan prioritas hasil		
22/1-18	Bab II, Rumus ulg & langkah Pembuatan skripsi yg dibgk & model: Elemen-hue.		
29/1-18	Bab III, & Definisi Operasional hrs dibgk dgn kuantitas dan det nya online or offline.		
31/1-18	Langkah analisis dan model Eshen hrs sesuai dgn metodologi Eshen		
6/2-18	All Bab fully revision, ACC II, & Diketahui papul skripsi.		

Medan, Januari 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

PROPOSAL DAN JUDUL PENELITIAN

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Medan.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan hormat
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Ananda
NPM : 1905100059
Konsentrasi :
Kelas/Sem : TB / 1
Alamat : Jl. Denai, Sy. Abdul Khaedir

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu :

Nama Pembimbing : disetujui Prodi : (.....)
Dari hasil survei di masyarakat dan lapangan, serta Institusi Pemerintah dan Swasta dalam penelitian serta proses pembimbingan maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh transfer daerah dalam pengembangan HDI
2. Bagaimana hubungan antara transfer daerah dengan HDI
3. Seberapa besar peningkatan pembangunan nasional pada kepemimpinan SBT dan Taxowit

Dengan demikian rencana judul yang disetujui ketua program studi adalah :

Implementasi Kebijakan Transfer Daerah dalam Meningkatkan
Pembangunan Nasional (Studi Kasus : Kepemimpinan SBT dan
Taxowit.)

Medan.....20....

Dosen Pembimbing
[Signature]
Dr. Pradipta H.R.S, M.Si

Peneliti Mahasiswa
[Signature]
Rizky Ananda

Disetujui Oleh :
Ketua / Sekretaris Prodi
[Signature]
Dr. Pradipta H.R.S, M.Si

Diagendakan Pada Tanggal :
Nomor Agenda :

Catatan :

1. Proposal Penelitian harus diagendakan paling lama 1 (satu) bulan setelah di paraf oleh ketua program studi.
2. Seminar Proposal paling lama 1 (satu) bulan setelah judul diagendakan.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : RIZKY ANANDA
NPM : 1905180059
Konsentrasi : -
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghormatan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 07...02-2018

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

klasifikasi Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
lainnya

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

NOMOR : 1217/TGS/II.3/UMSU-05/D/2018

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan **EKONOMI PEMBANGUNAN** Tanggal **21
Februari 2018**, Menetapkan Risalah / Skripsi :

Nama : **RIZKY ANANDA**
N P M : **1405180059**
Semester : **VIII (Delapan)**
Jurusan : **EKONOMI PEMBANGUNAN**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (CASE STUDY:
KEPEMIMPINAN SBY DAN JKW)**

Pembimbing : **Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan "**BATAL**" bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **06 Maret 2019**

Ditetapkan di: MEDAN

Pada Tanggal : 18 Jumadil Akhir 1439 H
06 Maret 2018 M

Wassalam
Dekan



HANA NURI, S.E., MM.,M.Si.

Penyusunan :

Wakil Rektor – II UMSU Medan.
Pertinggal.

LAMPIRAN

DATA E-VIEWS 8 DAN

HASIL OUTPUT

Tabel 4-1**Statistik Deskriptif Model IPM**

	IPM	DID	DAU	DAK	DD
Mean	67.27184	3.562574	699.9486	126.3828	4534.999
Median	68.64500	0.000000	642.3650	53.80500	4569.110
Maximum	79.60000	42.40000	3066.050	1493.680	9037.940
Minimum	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	10.38229	9.010446	434.7828	193.8054	2733.182
Skewness	-5.307136	2.695529	0.998216	3.346711	-0.080479
Kurtosis	34.83090	9.359582	5.483741	17.10000	2.042152
Jarque-Bera	19139.78	1181.632	172.6300	4141.401	16.03746
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000329
Sum	27446.91	1453.530	285579.0	51564.17	1850280.
Sum Sq. Dev.	43871.35	33043.57	76937700	15287133	3.04E+09
Observations	408	408	408	408	408

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Tabel 4-2**Statistik Deskriptif Model Pertumbuhan Ekonomi**

	PE	IPM
Mean	5.894853	67.27184
Median	5.830000	68.64500
Maximum	70.00000	79.60000
Minimum	-17.10000	0.000000
Std. Dev.	4.987361	10.38229
Skewness	5.880367	-5.307136
Kurtosis	75.46100	34.83090
Jarque-Bera	91611.49	19139.78
Probability	0.000000	0.000000
Sum	2405.100	27446.91
Sum Sq. Dev.	10123.62	43871.35
Observations	408	408

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Tabel 4-3**Regresi Berganda Model IPM**

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/15/18 Time: 12:35
 Sample: 2005 2016
 Periods included: 12
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 408

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.90178	1.269892	50.32064	0.0000
DID	0.053497	0.060999	0.877010	0.3810
DAU	0.000539	0.001294	0.416532	0.6772
DAK	0.006214	0.002701	2.300595	0.0219
DD	0.000445	0.000196	2.271496	0.0236
R-squared	0.026096	Mean dependent var		67.27184
Adjusted R-squared	0.016429	S.D. dependent var		10.38229
S.E. of regression	10.29665	Akaike info criterion		7.513694
Sum squared resid	42726.50	Schwarz criterion		7.562852
Log likelihood	-1527.794	Hannan-Quinn criter.		7.533146
F-statistic	2.699582	Durbin-Watson stat		0.317026
Prob(F-statistic)	0.030373			

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Tabel 4-4**Logaritma Natural Model IPM**

Dependent Variable: LOGIPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/26/18 Time: 20:39
 Sample (adjusted): 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 29
 Total panel (unbalanced) observations: 83

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.516179	0.074540	60.58727	0.0000
LOGDID	-0.003077	0.004943	-0.622444	0.5355
LOGDAU	-0.025027	0.009780	-2.559004	0.0124
LOGDAK	-0.010253	0.007089	-1.446268	0.1521
LOGDD	-0.008195	0.004638	-1.766716	0.0812
R-squared	0.163345	Mean dependent var		4.227550
Adjusted R-squared	0.120439	S.D. dependent var		0.049268
S.E. of regression	0.046206	Akaike info criterion		-3.253079
Sum squared resid	0.166527	Schwarz criterion		-3.107365
Log likelihood	140.0028	Hannan-Quinn criter.		-3.194539
F-statistic	3.807091	Durbin-Watson stat		0.206833
Prob(F-statistic)	0.007028			

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Tabel 4-5***Autoregressive Model of IPM***

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/20/18 Time: 12:21
 Sample (adjusted): 2006 2016
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 374
 Convergence achieved after 3 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.54708	1.660283	41.28639	0.0000
AR(1)	0.880121	0.018360	47.93787	0.0000
R-squared	0.860676	Mean dependent var		67.27366
Adjusted R-squared	0.860302	S.D. dependent var		10.20616
S.E. of regression	3.814681	Akaike info criterion		5.520924
Sum squared resid	5413.265	Schwarz criterion		5.541910
Log likelihood	-1030.413	Hannan-Quinn criter.		5.529256
F-statistic	2298.039	Durbin-Watson stat		2.198678
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.88			

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Tabel 4-6***Regresi Berganda Model Pertumbuhan Ekonomi***

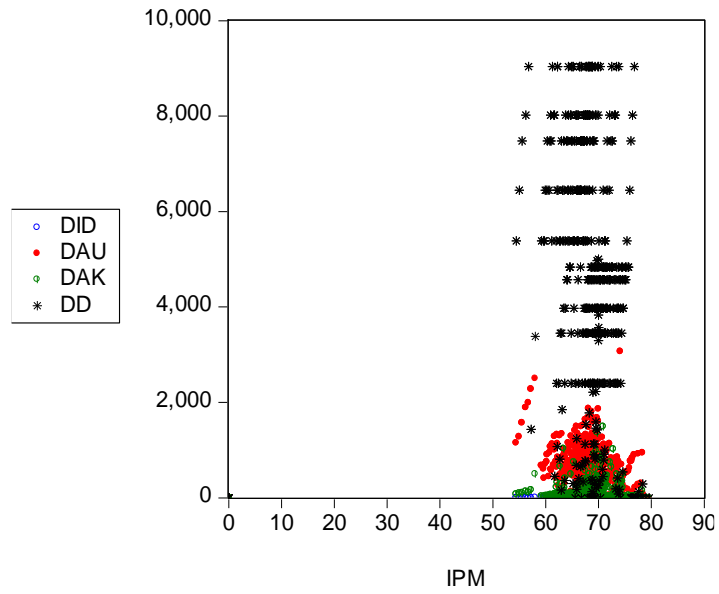
Dependent Variable: PE
 Method: Panel Two-Stage Least Squares
 Date: 03/19/18 Time: 20:41
 Sample: 2005 2016
 Periods included: 12
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 408
 Instrument specification: C DID DAU DAK DD
 Constant added to instrument list

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.235570	9.910385	0.528291	0.5976
IPM	0.009800	0.147273	0.066545	0.9470
R-squared	0.004172	Mean dependent var		5.894853
Adjusted R-squared	0.001720	S.D. dependent var		4.987361
S.E. of regression	4.983071	Sum squared resid		10081.38
F-statistic	0.004410	Durbin-Watson stat		1.671935
Prob(F-statistic)	0.947087	Second-Stage SSR		10123.51
Instrument rank	5	Prob(J-statistic)		0.111667

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Gambar 4-8

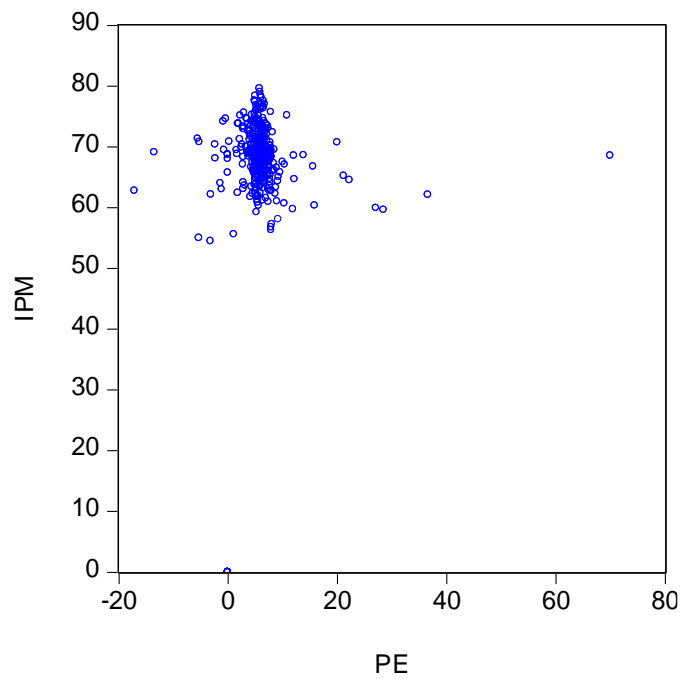
Scatterplot Model IPM



Sumber: E-Views 8 dan diolah

Gambar 4-9

Scatterplot Model Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: E-Views 8 dan diolah

Tabel 4-7

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	59.083599	4	0.0000

Sumber: E-Views 8 dan diolah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RIZKY ANANDA
N.P.M : 1405180059
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (STUDY CASE:
KEPEMIMPINAN SBY DAN JKW)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
5/03/2018	Cara penulisan pd Bab IV Nama 'saya' dgn skalar yg sdlh saya buat framework, scr bantuan		
09/03/2018	Plumy Data 4 mml I, II dgn Siphan E/aw. hn susuai dgn bantuan E/ambica		
13/03/2018	Hsl my Data msh ketawa ada bantuan yg hrs di obati, autokeut yg hrs di log Natunben		
21/03/2018	Model hrs di bacaiki lagi 4 Paul Data yg 2SL		
27/03/2018	Hsl analisis dr mml Eshn Cantun sdh ok!! ACC Sida !!		

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Medan, Dt Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS